

**ANALISIS SWOT TERHADAP
KEBIJAKAN PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF
DI MTs ANWAARUL HIDAYAH KARANGNANGKA
KEDUNGBANTENG BANYUMAS**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan (S. Pd.)

Oleh:

**HIMMAM AKBAR AULADY
NIM. 1617401061**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :
Nama : Himmam Akbar Aulady
NIM : 1617401061
Jenjang : S-1
Jurusan : Pendidikan Islam
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng Banyumas”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



Himmam Akbar Aulady
NIM. 1617401061



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

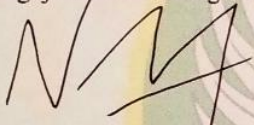
Skripsi Berjudul:
**ANALISIS SWOT TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN PENDIDIKAN
INKLUSIF DI MTS ANWAARUL HIDAYAH KARANGNANGKA
KEDUNGBANTENG BANYUMAS**

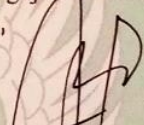
Yang disusun oleh Himmam Akbar Aulady, NIM 1617401061, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 4 April 2023, dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) pada sidang Dewan Penguji Skripsi.

Purwokerto, 3 Mei 2023


Penguji I/Ketua Sidang/Pembimbing,

Penguji II/Sekretaris Sidang,


Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
NIP. 19850525 201503 1 004


M. A. Hermawan, M.S.I.
NIP. 19771214 201101 1 003

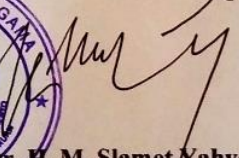
Penguji Utama,


Dwi Priyanto, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19760610 200312 1 004

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan Pendidikan Islam,




Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag.
NIP. 19721104 200312 1 003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
www.uinsaizu.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqasyah
Skripsi
Lamp : -

Kepada Yth,
Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

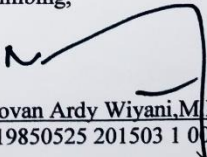
Setelah melaksanakan bimbingan, telaah arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari :

Nama : Himmam Akbar Aulady
NIM : 1617401061
Jenjang : S1
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Judul : Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan FTIK UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dapat diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 31 Maret 2023
Pembimbing,


Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I.
NIP. 19850525 201503 1 004

ANALISIS SWOT TERHADAP KEBIJAKAN PENERAPAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI MTs ANWAARUL HIDAYAH KARANGNANGKA KEDUNGBANTENG BANYUMAS

Himmam Akbar Aulady
NIM. 1617401061

Email: al.himm19@gmail.com

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam
Jurusan Pendidikan Islam
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Universitas Islam Negeri Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan kebudayaan, serta heterogenitas yang kompleks dari tiap-tiap elemen masyarakatnya. Mengerucut pada kompleksitas pendidikan di republik, yang dalam hal ini adalah anak bangsa yang memiliki keterbatasan, memiliki kebutuhan khusus, atau lebih spesifik pada disabilitas tertentu dipandang perlu untuk menerapkan pendidikan inklusif pada tiap-tiap lembaga pendidikan yang memang sudah membutuhkan adanya kelas inklusif. Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif sendiri, banyak hal yang harus dikaji lebih dalam sebagai bahan pertimbangan. Mengingat bahwa pendidikan inklusif memiliki nilai inklusifitas yang tidak semua orang, baik tenaga pendidik ataupun *stakeholder* yang ada pada sebuah lembaga pendidikan memahaminya secara komprehensif. Atas dasar itulah, mengkaji implementasi pendidikan inklusif pada sebuah lembaga pendidikan menggunakan metode analisis SWOT memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka, Kedungbanteng, Banyumas, merujuk pada faktor-faktor yang telah diteliti mencakup kekuatan dan kelebihan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancamannya (*Threats*), peneliti sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah telah berhasil. Namun demikian, keberhasilannya belumlah maksimal, melihat pada keterbatasan ruang dan waktu serta indikator-indikator dari kelemahan yang dimiliki oleh MTs Anwaarul Hidayah.

Kata kunci: *analisis SWOT, kebijakan, pendidikan inklusif, MTs Anwaarul Hidayah.*

**SWOT ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF INCLUSIVE
EDUCATION POLICIES AT MTs ANWAARUL HIDAYAH
KARANGNANGKA KEDUNGBANTENG BANYUMAS**

Himmam Akbar Aulady
NIM. 1617401061

Email: al.himm19@gmail.com

Islamic Education Management Study Program
Islamic Education Department Faculty of Tarbiyah and Teacher Training
State Islamic University Prof. Kyai Haji Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

The Unitary State of the Republic of Indonesia consists of various tribes and cultures, as well as the complex heterogeneity of each element of society. Focusing on the complexity of education in the republic, which in this case is the nation's children who have limitations, have special needs, or more specifically with certain disabilities, it is deemed necessary to implement inclusive education in every educational institution that already requires an inclusive class. In implementing inclusive education itself, many things must be studied more deeply for consideration. Given that inclusive education has an inclusive value that not everyone, both educators and stakeholders in an educational institution, understands it comprehensively. On this basis, assessing the implementation of inclusive education in an educational institution using the SWOT analysis method has a high degree of accuracy.

On this basis, assessing the implementation of inclusive education in an educational institution using the SWOT analysis method has a high degree of accuracy. In this study, the approach used is a qualitative research approach. Qualitative research methods are often called naturalistic research methods because the research is carried out in natural conditions (natural setting). Data collection techniques used through interviews, observation and documentation.

Based on the results of research that has been conducted at MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka, Kedungbanteng, Banyumas, referring to the factors that have been studied include strengths and weaknesses (Strengths), Weaknesses (Weaknesses), opportunities (Opportunities), and threats (Threats), researchers to the conclusion that the policy of implementing inclusive education at MTs Anwaarul Hidayah has been successful. However, its success has not been maximized, considering the limitations of space and time as well as indicators of weaknesses in MTs Anwaarul Hidayah.

Keywords: SWOT analysis, policy, inclusive education, MTs Anwaarul Hidayah.

MOTTO
YAKIN!



PERSEMBAHAN

Untuk Ibu, dan Bapak tentu; kalimatku tidak pernah mampu memberikan definisi atau mengumpamakan bagaimana sejatinya engkau. Dan kepada Tuhan; aku selalu berseru, agar kelak di akhir nanti kita semua dipertemukan. Sekali lagi, dengan menyebut nama Tuhan yang maha indah; terima kasih, Bu, Pak! Semoga baktiku senantiasa menjadi musabab setiap bahagiamu, *aamiin!*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada kita semua. Tak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Penulis bersyukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehat-Nya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng”.

Karya tulis ini diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang terlibat dan telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

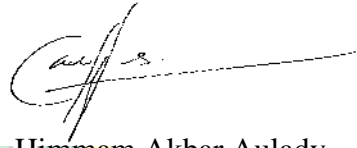
1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Suparjo, M.A., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. Subur, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Sumiarti, M.Ag., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. M. Slamet Yahya, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dr. Novan Ardy Wiyani, M.Pd.I., selaku Koordinator Prodi MPI UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyusun skripsi.
8. H. Rahman Afandi, S.Ag., M.S.I., selaku Penasihat Akademik MPI B angkatan 2016.

9. Dr. Kholid Mawardi, S.Ag., M.Hum., selaku guru sekaligus orang tua yang telah berjasa membangkitkan kembali semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
10. K.R.H.T. Dimas Indianto S., M.Pd.I. selaku guru dalam segala aspek, orang tua, sekaligus teman berdialektika yang senantiasa memberikan dukungan dan wejangan, baik moril maupun materil.
11. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Kedua orang tua penulis, Bapak Slamet Rianto dan Ibu Umma Farida yang doanya tiada putus, dan usahanya dalam mendidik tak pernah pupus. Atas semua jerih payah beliau berdua-lah, penulis bisa berdiri sampai sejauh ini, hingga akhirnya mampu menyelesaikan tanggung jawab akademis berupa skripsi. Tak lupa pula seluruh keluarga dan handai taulan, yang mungkin doanya tak pernah saya dengar namun senantiasa di-amin-kan Tuhan.
13. Keluarga besar MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng.
14. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan skripsi ini, antara lain:
 - Kedua karibku, saudara Miftahul Ikhsan, S.Pd., dan saudara Ahmad Nur Bekti, S.Pd., yang selalu menerima saya dengan lapang dada dan tangan terbuka, serta memberi dukungan tanpa henti. Semoga kita dibersamakan Tuhan kembali pada pertemuan janji-Nya yang paling sejati, *aamiin*;
 - Saudara Chubbi Syauqi, S.Pd., selaku adik seperguruan yang turut membantu tanpa henti, dan juga saudari Desi Rahmawati, S.Pd., yang juga tak pernah lelah memberi saya dukungan moril dan materil;
 - Kang Mas Feri Dwianto, S.E., selaku kepala suku di hunian elit Wisma Cendana yang tak pernah berhenti memberi saya tumpangan sekaligus rela berdesak-desakan tempat agar saya juga muat ikut tidur di atas kasur berukuran 40 cm X 200 cm; terakhir
 - Seseorang yang tidak bisa saya sebut namanya; yang membuat saya fasih dalam patah, hingga mampu bangkit dengan gagah dan tentu, tabah; serta
 - Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa disebut namanya satu per satu;

Demikianlah, ucapan dari penulis atas rasa syukurnya dapat menyelesaikan tugas skripsi ini. Penulis hanya berharap semoga apa yang ditulis memberikan manfaat bagi pembaca siapa saja. Tak lupa juga penulis mengharapkan saran/kritik agar ke depannya penulis mampu berbenah menjadi lebih baik lagi.

Purwokerto, 31 Maret 2023

Penulis,



Himmam Akbar Aulady
1617401061



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Konseptual	6
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Analisis SWOT Kebijakan	13
1. Pengertian Analisis SWOT	13
2. Pengertian Kebijakan	14
3. Fungsi Analisis SWOT Kebijakan	15
B. Pendidikan Inklusif	15
1. Pengertian Pendidikan Inklusif	15
2. Kebijakan Pendidikan Inklusif	17
3. Implementasi Pendidikan Inklusif	18
4. Tujuan Pendidikan Inklusif	19
5. Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah ...	20

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	21
	B. Tempat Dan Waktu Penelitian	21
	C. Subjek dan Objek Penelitian	22
	D. Teknik Pengumpulan Data	23
	E. Teknik Analisa Data.....	25
	F. Uji Keabsahan Data	27
BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. MTs Anwaarul Hidayah	28
	1. Sejarah Singkat MTs Anwaarul Hidayah	28
	2. Profil MTs Anwaarul Hidayah	29
	3. Daftar Siswa Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah Tahun 2022/2023	34
	B. Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah	34
	1. Faktor Kekuatan Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif	34
	2. Faktor Kelemahan Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif	38
	3. Faktor Peluang Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif	43
	4. Faktor Tantangan Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif	45
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran	50
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Merujuk pada pembukaan UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi di Indonesia, salah satu amanat yang tertuang di dalamnya adalah bahwa negara memiliki kewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa. Apabila dikaji lebih dalam, amanat ini tidak lain menyoal pendidikan. Kemudian, jika berbicara mengenai pendidikan, maka hari ini seharusnya seluruh masyarakat di Indonesia mendapatkan pendidikan yang setara, dan penerapannya sudah merata, mengingat Indonesia sendiri sudah melewati tujuh dekade pasca amanat tersebut dirumuskan. Kemudian, amanat tentang pendidikan ini dipertegas lagi di dalam batang tubuh UUD 1945 pasal 31 yang menyebutkan bahwa: *Pertama*, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran; *Kedua*, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang¹.

Dalam pengimplementasiannya, penerapan serta pemerataan pendidikan ditopang pula oleh turunan dari dasar hukum UUD 1945 berupa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berbunyi bahwa, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”². Dengan kejelasan dasar hukum yang telah disebutkan di atas, secara garis besar bisa disimpulkan bahwa pendidikan masuk ke dalam daftar kewajiban yang prioritas bagi negara beserta pengelolanya selain melindungi bangsa Indonesia dan segenap tumpah darahnya, memajukan kesejahteraan umum,

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

² UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

atau ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari beragam suku dan kebudayaan, serta heterogenitas yang kompleks dari tiap- tiap elemen masyarakatnya, lantas, bagaimana nasib anak bangsa yang dalam hal ini memiliki keterbatasan, memiliki kebutuhan khusus, atau lebih spesifik pada disabilitas tertentu? Kemudian, bagaimana menyikapi pemerataan pendidikan pada mereka yang menyandang disabilitas tersebut? Jawabannya adalah menerapkan pendidikan inklusif pada tiap-tiap lembaga pendidikan yang memang sudah membutuhkan adanya kelas inklusif!

Dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif sendiri, banyak hal yang harus dikaji lebih dalam sebagai bahan pertimbangan. Mengingat bahwa pendidikan inklusif sendiri memiliki nilai inklusifitas yang tidak semua orang, baik tenaga pendidik ataupun *stakeholder* yang ada pada sebuah lembaga pendidikan memahaminya secara komprehensif. Atas dasar itulah, mengkaji implementasi pendidikan inklusif pada sebuah lembaga pendidikan menggunakan metode analisis SWOT memiliki tingkat akurasi yang tinggi. Analisis SWOT sendiri merupakan suatu model dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan secara sistematis³.

Analisis SWOT, lebih jauh lagi yaitu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang akan dijalankan di dalam sebuah lembaga. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman atau hambatan (*threats*). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi yang diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan mampu meminimalkan

³ Edi Suarto. (2020). *Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis SWOT*. Jurnal Geografi. Vol. 1. No. 2.

kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*)⁴.

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor⁵: a) Kekuatan (*Strength*), yakni merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi, proyek, atau konsep; b) Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi sebagai segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi organisasi; c) Peluang (*Oppurtunities*) kondisi di mana menjadi daya berkembang suatu organisasi; d) Ancaman (*Threats*) kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu organisasi.

Menjadi suatu hal yang menarik serta memiliki banyak kecocokan apabila analisis SWOT digunakan dalam kajian pendidikan inklusif, mengingat pendidikan inklusif sendiri memiliki tingkat kerumitan dan kerentanan terhadap kesalahan persepsi, baik dari pihak pemangku kebijakan, pihak tenaga pendidik, maupun pihak siswa khususnya para wali siswa. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat, di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Artinya, dalam model inklusi, siswa dengan kebutuhan khusus menghabiskan sebagian waktu mereka bersama dengan siswa biasa (normal) untuk mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Hal ini dilandasi oleh suatu kenyataan bahwa di dalam masyarakat terdapat anak normal dan anak tidak normal (berkebutuhan khusus) dan sebagai suatu komunitas sosial tidak dapat dipisahkan⁶. Senada dengan pernyataan Allen dan Cowdery, dikemukakan bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang menyertakan semua anak. Mereka berada dalam suatu iklim kebersamaan

⁴ Rangkuti Freddy. 2014. *Analisis SWOT Teknik Pembeda Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁵ Anissa Mayang dkk. 2020. *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)*. Vol. 17. No. 2.

⁶ K.E. Allen & Cowdery. 2000. *The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education* (4 ed.). USA: Delmar Cengage Learning.

dan memperoleh proses pembelajaran dengan layanan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik. Layanan pendidikan ini tidak membedakan anak yang berasal dari latar suku, kondisi sosial, atau kemampuan memenuhi hak anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak.

Apabila pendidikan inklusif diartikan sebagai pendidikan untuk semua, dan mengikutsertakan semua anak tanpa kecuali, dengan mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus di kelas umum dengan anak-anak lainnya, maka anak berkebutuhan khusus harus diartikan secara lebih luas, bukan hanya yang mempunyai hambatan fisik (tuna netra, tuna rungu, tuna wicara) dan nonfisik (intelektual), akan tetapi juga anak dengan hambatan belajar karena geografis, faktor sosial ekonomi dan budaya.

Menurut Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya⁷. Pengertian pendidikan inklusif sejalan dengan Permendiknas Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus, bahwa pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, sosial, dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk belajar bersama- sama dengan peserta didik lain pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan kejuruan, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana, pendidik,

⁷ Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

tenaga kependidikan dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan individual peserta didik⁸. Intinya, pendidikan inklusif merupakan bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di sekolah umum/madrasah dengan menyediakan berbagai fasilitas pembelajaran yang dibutuhkan oleh mereka.

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia tidak hanya harus diterapkan pada sekolah-sekolah yang berbasis negeri, namun juga pada madrasah-madrasah di bawah naungan kementerian agama. Penerapan pendidikan inklusif pada madrasah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah menyebutkan bahwa, madrasah wajib menyediakan akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus⁹. Upaya pemerintah untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) juga tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa, serta Surat Edaran Dirjen Pendidikan Nomor 380/C./C6/MN/2003, tanggal 20 Januari 2003, yakni, “Setiap Kabupaten/Kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Dewasa ini, banyak madrasah dari tingkat dasar hingga menengah sudah mulai menerima anak berkebutuhan khusus sebagai peserta didik, salah satunya adalah MTs Anwaarul Hidayah. MTs Anwaarul Hidayah merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama di bawah naungan swasta, yaitu Yayasan Anwaarul Hidayah yang beralamat di Jl. Lingkar Utara RT 03 RW 01 Desa Karangangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Secara legal formal, sekolah ini berdiri pada tahun 2020 dengan sistem yang diterapkan adalah sistem

⁸ Permendiknas Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.

⁹ Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

belajar *boarding school* yang menggabungkan antara pendidikan formal dengan pendidikan ala pesantren. Dalam perjalanan pendidikannya, MTs Anwaarul Hidayah kerap mendapatkan peserta didik yang memiliki berbagai macam karakter hingga peserta didik dengan kebutuhan khusus. Oleh sebab itulah, kemudian MTs Anwaarul Hidayah mulai menerapkan kelas inklusif di lingkungan sekolahnya guna memfasilitasi para peserta didik yang masuk kategori di atas atau di bawah rata-rata peserta didik lain pada umumnya, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus.

Kemudian, seiring berjalannya waktu, masalah demi masalah mulai muncul dalam proses penerapan pendidikan inklusif ini. Salah satu persoalan yang seringkali menjadi sorotan adalah masih banyak pengelola madrasah yang belum memahami sepenuhnya bagaimana penyelenggaraan dan penerapan pendidikan inklusif yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya, serta memiliki kesesuaian dengan peraturan dan standar kompetensi yang menaunginya. Hal tersebut kemudian melatarbelakangi penulis untuk meneliti dan menganalisis lebih dalam mengenai Kebijakan Penerapan pendidikan Inklusif di MTs Anwaarul Hidayah.

B. Definisi Konseptual

1. Analisis SWOT Kebijakan

Prof. Dr. Nanang Fattah mengutip pendapat dari Patton dan Sawicky, yang mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu rangkaian proses dalam menghasilkan kebijakan. Sedangkan Duncan MacRae mengartikan analisis kebijakan ini sebagai suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan argumentasi rasional dengan menggunakan fakta-fakta untuk menjelaskan, menilai, dan membuahakan pemikiran dalam rangka upaya memecahkan masalah publik¹⁰. Sedangkan Analisis SWOT adalah instrumen perencanaan

¹⁰ Nanang Fattah. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014). Hlm 3.

strategi yang klasik dengan menggunakan kerangka kerja kekuatan dan kelemahan, peluang dan ancaman. Instrumen ini memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik untuk melaksanakan suatu strategi¹¹.

2. Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya¹².

3. MTs Anwaarul Hidayah

MTs Anwaarul Hidayah merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama di bawah naungan swasta, yaitu Yayasan Anwaarul Hidayah yang beralamat di Jl. Lingkar Utara RT 03 RW 01 Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Secara legal formal, sekolah ini berdiripada tahun 2020 dengan sistem yang diterapkan adalah sistem belajar boardingschool yang menggabungkan antara pendidikan formal dengan pendidikan ala pesantren¹³.

Jadi, analisis SWOT terhadap kebijakan penerapan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah menyoroti perihal kekuatan, kelebihan, serta potensi yang dimiliki oleh MTs Anwaarul Hidayah, dan bersamaan dengan itu juga mempertimbangkan berbagai macam kekurangan yang kiranya harus segera dilengkapi untuk menunjang proses penerapan pendidikan inklusif, kemudian memperhatikan tingkat ancaman yang di kemudian hari dimungkinkan akan mengganggu dan menghambat jalannya penerapan pendidikan inklusif pada peserta didik yang ada di MTs Anwaarul Hidayah.

¹¹ Rangkuti Freddy. 2014. *Analisis SWOT Teknik Pembeda Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

¹² Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

¹³ Dokumen Profil MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka, Kedungbanteng.

C. Rumusan Masalah

Melihat latar belakang masalah serta merujuk pada definisi konseptual yang termaktub di atas, peneliti sampai pada perumusan masalah yang mengerucut pada “Bagaimana Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng?”.

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian, tujuannya dibagi menjadi dua:

a. Tujuan Umum

Menganalisis kebijakan yang berkaitan dengan penerapan pendidikan inklusif bagi lembaga pendidikan tingkat menengah atau yang setara dengan itu.

b. Tujuan Khusus

Untuk menganalisis sejauh mana pendidikan inklusif diterapkan di MTsAnwaarul Hidayah Karangnangka.

2. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian sudah selayaknya dapat memberikan manfaat penelitian yang bersifat teoritis dan bersifat praktis. Dalam penelitian kualitatif, manfaat ini lebih bersifat teoritis, sebab erat kaitannya dengan pengembangan ilmu, namun tidak menutup kemungkinan terdapat pula manfaat praktisnya dalam pemecahan sebuah masalah yang berkelindan di ranah pendidikan. Beberapa pihak yang diharapkan dapat merasakan manfaat penelitian ini antara lain:

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah mengenai penerapan pendidikan inklusif pada madrasah atau lembaga pendidikan yang setara itu.

b. Secara Praktis

1) Bagi Ketua Yayasan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menstimulasi semua stakeholder dari Yayasan Anwarul Hidayah agar geliat pemenuhan inklusifitas dalam pendidikan dapat terus dikembangkan, sehingga dapat dirasakan dampak dan manfaatnya, bagi semua warga sekolah maupun masyarakat di sekitarnya.

2) Bagi Guru

Diharapkan mampu terus berinovasi dalam memberikan pembelajaran kepada para peserta didik yang berkebutuhan khusus sehingga tujuan pendidikan bisa tercapai secara optimal.

3) Bagi Kepala MTs Anwarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng

Melalui penelitian ini, diharapkan Kepala MTs Anwarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng lebih mampu memfasilitasi peserta didik yang terdaftar ke dalam kelas inklusif, sehingga tujuan pendidikan inklusif yang ada MTs Anwarul Hidayah dapat dimaksimalkan.

4) Bagi Peneliti Lain

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi mengenai sekolah inklusif dan bagaimana penerapannya di dalam instansi pendidikan khususnya di MTs Anwarul Hidayah KarangNangka. Selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi dunia keilmuan sehingga dapat dikembangkan lebih luas dan lebih intensif lagi.

E. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang dilakukan peneliti, ada beberapa sumber yang penting untuk melakukan penelitian ini. Maka dari itu, dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil dari penelitian sebelumnya, antara lain:

Skripsi Kamal Fuadi, dengan Judul “Analisis Kebijakan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi DKI Jakarta”¹⁴. Skripsi tersebut membahas tentang bagaimana pendidikan inklusif diterapkan hingga dampak dari penerapannya di Provinsi DKI Jakarta. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis mengupas tentang analisis SWOT dalam implementasi pendidikan inklusi di Mts.

Jurnal karya Suhelayanti dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan” yang mengupas bagaimana sebuah kebijakan pendidikan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim diterapkan¹⁵. Pada skripsi penulis, akan mengupas analisis SWOT dalam kebijakan pendidikan inklusi di MTs.

Jurnal karya Mayya, dkk dengan judul “ Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar” dalam jurnal ini mengkaji penyelenggaraan pendidikan inklusi dari sisi implementasi kebijakan sumber daya inklusi, tata kelola dan komitmen implementator¹⁶. Jurnal ini memiliki kesamaan dengan skripsi penulis berupa analisis kebijakan inklusif. Sedangkan perbedaan skripsi penulis dengan jurnal tersebut adalah bagaimana kebijakan swot dalam menerapkan pendidikan Inklusif di MTs Anwarul Hidayah Kedungbanteng.

Jurnal karya Farhan dkk, dengan judul “Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi” dalam jurnal ini memiliki kesamaan mengulas tentang kebijakan pendidikan inklusi, hanya saja jurnal ini memiliki perbedaan dengan skripsi penulis yakni, jurnal tersebut *mengulas* pendidikan inklusi secara global mengenai pendidikan inklusi di Indonesia¹⁷. Sedangkan perbedaannya, yakni skripsi penulis mengulas

¹⁴ Kamal Fuadi. 2015. *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta*. Hikmah: Jurnal Islami Studies. Vol. 11. No. 2.

¹⁵ Sehelayati. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. Vol. 30. No. 3.

¹⁶ Mayya dkk. 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 26. No. 1.

¹⁷ Farhan Alfikri dkk. 2022. *Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi*. Syntax Literate:

endidikan inklusi dalam ranah sekolah.

Jurnal karya Robiatul Munjyah dkk, dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar” jurnal ini mengupas bagaimana implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar¹⁸. Jurnal ini memiliki beberapa kesamaan dengan skripsi penulis, yakni mengenai pendidikan inklusi. Sedangkan perbedaannya, antara lain: jurnal ini mengupas tentang implementasi pendidikan inklusi yang sudah ada di Sekolah Dasar, Sedangkan skripsi penulis mengulas tentang bagaimana kebijakan pendidikan inklusi pada Madrasah Tsanawiyah MTs di analisis dengan cara SWOT.

F. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah pembahasan yang sistematis, utuh dan logis, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yakni bab I sampai bab V. Masing-masing bab akan menjelaskan prosedural yang dilakukan oleh peneliti, yang dimulai dari penyusunan proposal sampai dengan penarikan kesimpulan hasil penelitian.

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi gambaran secara umum mengenai penelitian yang dilakukan sehingga memudahkan pembaca mengetahui isi dari penelitian. Bab ini berisi latar belakang yang mendasari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Fokus bahasan selanjutnya adalah Landasan Teori yang masuk pada Bab II. Pada bab ini akan disajikan tentang teori yang berkaitan dengan analisis SWOT Kebijakan dan Pendidikan Inklusif. Kemudian memasuki Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab ini berisi metode yang digunakan penulis dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7. No.6.

¹⁸ Robiatul Munajah dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu. Vol. 5. No. 3.

Setelah melakukan rangkaian prosedur penelitian, selanjutnya peneliti masuk pada pembahasan hasil penelitian yang kemudian disusun pada Bab IV. Pada bab ini akan disajikan penjabaran tentang analisis SWOT terhadap kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka, Kedungbanteng. Setelah hasil dari penelitian ini selesai dibahas dan dijabarkan, penelitian ini akan ditutup dengan Bab Ke-V yang berisi kesimpulan yang peneliti peroleh dari seluruh rangkaian proses penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Analisis SWOT Kebijakan

1. Pengertian Analisis SWOT

Dalam merumuskan sebuah kebijakan, langkah yang pertama kali dilakukan salah satunya adalah menganalisis. Analisis sendiri berguna sebagai pencegah terhadap terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan dampak negatif atau bahkan sebuah kerugian yang bersifat moril maupun materil di kemudian hari. Salah satu teknik menganalisis yang kali ini dipakai oleh peneliti adalah teknik analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu model dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan secara sistematis sehingga permasalahan itu dapat dipecahkan secara mudah¹⁹.

Analisis SWOT, lebih jauh lagi yaitu mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi yang akan dijalankan di dalam sebuah lembaga. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman atau hambatan (*threats*). Menurut Santono (2021), Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam merumuskan strategi yang diharapkan dapat memaksimalkan kekuatan (*strength*), dan peluang (*opportunities*) namun secara bersamaan mampu meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*).

Analisis SWOT dilakukan dengan maksud mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Analisis SWOT terdiri dari empat faktor²⁰: a) Kekuatan (*Strength*), yakni merupakan kondisi kekuatan yang terdapat

¹⁹ Effendi Susanto. 2020. *Kajian Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dengan Analisis SWOT Di SMP N Inklusi*. Jurnal Pendidikan Luar Biasa. Vol. 1. No. 2.

²⁰ Anissa Mayang dkk. 2020. *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)*. Vol. 17. No. 2.

dalam organisasi, proyek, atau konsep; b) Kelemahan (*Weakness*) merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi sebagai segala faktor yang tidak menguntungkan atau merugikan bagi organisasi; c) Peluang (*Opportunities*) kondisi di mana menjadi daya berkembang suatu organisasi; d) Ancaman (*Threats*) kondisi yang mengancam dari luar yang dapat mengganggu organisasi.

Jadi, secara garis besar, Analisis SWOT menyorot pada sistematisasi dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan, sehingga dapat memaksimalkan potensi dan kekuatan yang dimiliki (*strength*), kemudian melihat peluang yang dapat dimanfaatkan (*opportunities*). Dalam waktu yang bersamaan, juga dapat mempertimbangkan adanya kelemahan atau kekurangan (*weakness*) serta meminimalkan adanya sebuah ancaman dan hambatan (*threats*).

2. Pengertian Kebijakan

Secara garis besar, kebijakan dapat diartikan sebagai serangkaian konsep dan asas yang akan digunakan dalam menjalankan suatu pekerjaan sesuai dengan disiplin pekerjaannya. Untuk merumuskan sebuah konsep itu sendiri, diperlukan adanya sebuah kecakapan dalam memahami sesuatu. Kemudian, asas didasarkan atas perilaku yang lebih condong pada kultur dari entitas masyarakat dalam suatu daerah atau tempat tertentu²¹.

Lebih lugas dalam konteks penggunaannya di kehidupan sehari-hari, kebijakan yaitu konsep dan asas yang menjadi pedoman dasar dan garis haluan dalam implementasi suatu pekerjaan dan kepemimpinan organisasi, pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud untuk manajemen sebagai upaya mencapai sasaran yang telah ditentukan²².

²¹ Dody Setyawan. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media. Hal.

²² Kuncoro, Nur . 2012. *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).

3. Fungsi Analisis SWOT Kebijakan

a. Fungsi analisis SWOT mencakup beberapa fungsi, antara lain:

1. Menganalisis kekuatan dan potensi
2. Menganalisis kelemahan dan kekurangan
3. Menganalisis peluang
4. Menganalisis ancaman serta hambatan

b. Fungsi Analisis Kebijakan mencakup dua fungsi utama, yaitu:²³

1. Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi secara terperinci menjelaskan pengalokasian agenda penelitian, pengembangan, dan analisis kebijakan itu sendiri dalam tingkatan yang lebih makro dan lebih strategis, suprastruktur (politik), maupun dalam tingkatan sektoral (teknis).

2. Fungsi Inkuiri

Fungsi inkuiri akan mulai berjalan apabila fungsi alokasi sudah dilaksanakan. Bisa dikatakan, fungsi inkuiri lebih menitikberatkan pada proses pengawasan, supervisi, dan verifikasi. Menurut Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, kegiatan penelitian tidak harus dilakukan oleh para analis kebijakan, tetapi juga dapat dilakukan oleh orang lain, atau mungkin lembaga lain yang memang memiliki kemampuan dalam hal tersebut, sebab kegiatan penelitian ini sangat terikat dengan hukum penelitian yang baku dan tentu saja, memerlukan adanya sebuah keahlian.²⁴

B. Pendidikan Inklusif

1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan pada dasarnya adalah transportasi yang dipakai oleh umat manusia menuju peradaban yang lebih manusiawi, serta membebaskan diri dari belenggu ketidaktahuan yang kerap menjadi

²³ Nanang Fattah. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3

²⁴ Ace Suryadi & HAR Tilar. *Analisis Kebijakan: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya. Hal. 3

sumber masalah dan sumber musibah²⁵. Dari pernyataan Freire ini, secara singkat dapat diartikan bahwa pendidikan seharusnya mampu menjadi sarana pembebasan bagi siapa saja yang mau menempuhnya. Pembebasan di sini, lebih jauh Freire mengatakan, yaitu bebas dari setiap sikap yang di kemudian hari justru dapat menyebabkan adanya kemunduran peradaban. Sebab pada dasarnya pendidikan sendiri selalu menyanggah proyeksi tentang bagaimana seharusnya manusia bertindak di kemudian hari.

Namun demikian, dewasa ini tidak semua orang bisa mendapat akses pendidikan yang sama. Berbagai faktor selalu berkelindan seiring berjalannya waktu sehingga memunculkan problematika yang baru. Salah satu problematika yang menjadi sorotan peneliti pada penelitian kali ini menyoal inklusifitas di dalam ranah pendidikan. Kemudian problematika tersebut mulai disolusikan dengan dibentuknya sebuah wadah berupa kebijakan penerapan kelas inklusif.

Istilah pendidikan inklusif atau pendidikan inklusi merupakan kata atau istilah yang dikumandangkan oleh UNESCO, yang berasal dari kata *Education for All* yang artinya pendidikan yang ramah untuk semua, dengan pendekatan pendidikan yang berusaha menjangkau semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh manfaat yang maksimal dari pendidikan. Hak dan kesempatan itu tidak dibedakan oleh keragaman karakteristik individu secara fisik, mental, sosial, emosional, dan bahkan status sosial ekonomi. Pada titik ini tampak bahwa konsep pendidikan inklusif sejalan dengan filosofi pendidikan nasional Indonesia yang tidak membatasi akses peserta didik kependidikan hanya karena perbedaan kondisi awal dan latar belakangnya²⁶.

²⁵ Paulo Freire. Pendidikan Kaum Tertindas. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia. 2013).

²⁶ Nana S. (2007). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung; Rosda Karya, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Juli 2013; 112-121 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 121

Inklusif pun bukan hanya bagi mereka yang berkelainan atau luar biasa melainkan berlaku untuk semua anak. Dengan demikian yang dimaksud pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mensyaratkan anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas biasa bersama teman-teman seusianya. Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif adalah sekolah yang menampung semua murid di kelas yang sama. Sekolah ini menyediakan program pendidikan yang layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap murid maupun bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh para guru, agar anak-anak berhasil.

Berdasarkan batasan tersebut pendidikan inklusif dimaksudkan sebagai sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Semangat penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa diskriminasi.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya²⁷.

2. Kebijakan Pendidikan Inklusif

Dasar hukum yang mengatur tentang pendidikan inklusif termaktub dalam Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif. Dalam pasal 3 ayat 1 Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 menyebutkan bahwa, “setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional,

²⁷ Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.

mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”.

Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa, “peserta didik yang memiliki kelainan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas: a. Tunanetra; b. Tunarungu; c. Tunawicara; d. Tunagrahita; e. Tunadaksa; f. Tunalaras; g. Berkesulitan belajar; h. Lamban belajar; i. Autis; j. Memiliki gangguan motorik; k. Menjadi korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat adiktif lainnya; l. Memiliki kelainan lainnya; m. Tunaganda”. Dari semua kelainan yang dialami para anak berkebutuhan khusus (ABK) yang disebutkan pada ayat (2) di atas, seluruhnya memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan tanpa terkecuali.

3. Implementasi Pendidikan Inklusif

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab mengatakan bahwa: implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Meter dan Horn dalam Winarno mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai berikut: tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya²⁸.

Tindakan-tindakan tersebut mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik

²⁸ Santrock, J.W. (2004). *Education Psychology*. NewYork: McGraw-Hill Company, Inc

yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan yang menjadi landasan acuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah landasan filosofis, landasan yuridis, landasan pedagogis dan landasan empiris. Dalam *setting* penyelenggaraan program pendidikan inklusif di sekolah reguler terdapat sejumlah anak berkebutuhan khusus yang merupakan sebagian kecil dari jumlah peserta didik (siswa) yang bersekolah²⁹. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dalam pendidikan memerlukan pelayanan yang spesifik, berbeda dengan anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus juga didefinisikan sebagai anak yang mempunyai karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya.

Sedangkan pendapat lain menyebutkan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dianggap memiliki kelainan penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal umumnya, baik hal fisik, mental maupun karakteristik perilaku sosialnya. Kategori anak berkebutuhan khusus dalam aspek fisik meliputi anak dengan kelainan indera mata (tunanetra), kelainan kemampuan bicara (tunawicara), dan kelainan fungsi anggota tubuh (tunadaksa). Adapun Kategori ABK dalam aspek mental meliputi anak yang memiliki kemampuan mental lebih atau unggul (Cerdas Istimewa/Bakat Istimewa), dan memiliki kemampuan mental sangat rendah (tunagrahita). Sedangkan kategori ABK dalam aspek sosial adalah anak yang memiliki kesulitan dalam menyesuaikan perilakunya terhadap lingkungan sekitar yang disebut juga anak tunalaras.

4. Tujuan Pendidikan Inklusif

Tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental dan sosial atau

²⁹ Eko Putro Widoyoko. (2011). *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai kebutuhan dan kemampuannya, selain itu untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik³⁰. (Permendiknas No.70 tahun 2009 pasal 2 ayat 1 dan 2).

Adapun tujuan lain diselenggarakannya pendidikan inklusif ini adalah untuk memberikan kesempatan yang setara berupa layanan pendidikan yang efektif kepada semua siswa termasuk mereka yang memiliki kelainan dengan alat bantu tambahan yang diperlukan sesuai usia dan kelas di lingkungan mereka dengan tujuan untuk mempersiapkan siswa untuk hidup secara produktif sebagai anggota masyarakat.

C. Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah

Proses menganalisis menggunakan metode SWOT dengan tempat penelitian MTs Anwaarul Hidayah yang melibatkan beberapa narasumber meliputi kepala madrasah, wakil kepala kurikulum, dan beberapa guru reguler. Hasil dari proses analisis ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar di MTs Anwaarul Hidayah, khususnya meyangkut kegiatan belajar mengajar siswa inklusif.

³⁰ Djudju Sudjana. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya : Bandung

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang lebih alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive and snowball*³¹.

Mengutip pendapat Zainal Abidin bahwa studi kasus adalah penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu³². Pada hakikatnya penelitian ini memiliki cita-cita untuk mengetahui sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus untuk mengetahui secara mendalam analisis SWOT kebijakan penerapan pendidikan inklusif MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian yang dipilih untuk melakukan penelitian yaitu MTs Anwaarul Hidayah yang merupakan salah satu sekolah tingkat menengah pertama di bawah naungan swasta, yaitu Yayasan Anwaarul Hidayah yang

³¹ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2018). Hlm 14-15.

³² Zainal Arifin. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2014). Hlm 152.

beralamat di Jl. Lingkar Utara RT 03 RW 01 Desa Karangnangka, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas. Alasan memilih lokasi penelitian di MTs Anwaarul Hidayah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Secara legal formal, sekolah ini berdiri pada tahun 2020 dengan sistem yang diterapkan adalah sistem belajar *boarding school* yang menggabungkan antara pendidikan formal dengan pendidikan ala pesantren.
- b. Dalam perjalanan pendidikannya, MTs Anwaarul Hidayah kerap mendapatkan peserta didik yang memiliki berbagai macam karakter hingga peserta didik dengan kebutuhan khusus.
- c. MTs Anwaarul Hidayah sudah menerapkan kelas inklusif di lingkungan sekolahnya guna memfasilitasi para peserta didik yang masuk kategori di atas atau di bawah rata-rata peserta didik lain pada umumnya, dalam hal ini anak berkebutuhan khusus.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan 20 Februari 2023 (41 hari).

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah kebijakan penerapan pendidikan inklusif dengan fokus penelitian adalah analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threat analysis*) terhadap kebijakan penerapan pendidikan inklusif di Mts Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng.

2. Subjek Penelitian

Untuk mendapatkan informasi yang benar, penulis akan mengambil beberapa subjek penelitian antara lain:

a. Kepala MTs Anwaarul Hidayah

Kepala Madrasah Tsanawiyah merupakan orang yang bertanggungjawab secara keseluruhan kepada lembaga pendidikan MTs

Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng, dari kepala sekolah diperoleh gambaran umum mengenai analisis SWOT penerapan kebijakan pendidikan inklusif.

b. Wakil Kepala Bagian Kurikulum MTs Anwarul Hidayah

Waka Kurikulum bertugas membantu kepala madrasah dalam penyusunan perencanaan, membuat program serta melaksanakan program pembelajaran.

c. Guru MTs Anwarul Hidayah

Guru merupakan pihak yang mengampu peserta didik dalam proses pembelajaran di MTs Anwarul Hidayah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan menggunakan metode triangulasi (gaungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini mengumpulkan data dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk melakukan penggalian informasi dalam menemukan permasalahan yang harus diteliti, maupun apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dengan jumlah responden yang sedikit. Wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, melalui tatap muka maupun media berupa telepon dan lainnya.³³

Teknik wawancara ini digunakan oleh peneliti untuk mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai analisis SWOT terhadap kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng. Wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur dan wawancara tidak terstruktur kepada semua informan dalam

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 194.

praktiknya, informan dimintai pendapat dan idenya sedangkan penulis mencatat apa yang disampaikan informan.³⁴

Wawancara dengan Kepala Sekolah di Mts Anwaarul Hidayah mengenai kebijakan penerapan pendidikan inklusif serta upaya yang dilakukan MTs dalam pengelolaan pendidikan inklusif secara umum. Wawancara dengan Guru mengenai bagaimana layanan terhadap peserta didik serta upaya dari guru pribadi dalam mengembangkan kompetensinya.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek alam yang lain. Teknik ini digunakan apabila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi berdasarkan proses pelaksanaannya, dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation* (observasi tidak berperan serta).³⁵

Penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk melakukan pengamatan baik secara langsung maupun tidak langsung pada analisis SWOT terhadap kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng. Di sini penulis menggunakan observasi tidak berperan serta yakni dalam mengumpulkan data, penulis datang dalam tempat kegiatan sumber data tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan salah satu teknik atau cara mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen-dokumen lainnya yang ditulis maupun dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.³⁶

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 420

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 203.

³⁶ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, (Jakarta:

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan contohnya catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan dan yang lainnya. Dokumen yang berbentuk gambar contohnya foto, sketsa, gambar hidup dan lainnya. Dokumen yang berbentuk karya monumental contohnya karya seni, berupa gambar, patung, film dan lainnya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan bukti dokumen seperti sejarah maupun autobiografi dan juga foto-foto atau karya tulis dan karya seni yang telah ada.³⁷ Teknik dokumentasi ini akan digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen maupun foto-foto yang didapat selama proses penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Data pada penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya secara sistematis sehingga mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁸

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan memiliki jumlah yang cukup banyak, oleh karena itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data yang didapat semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dalam hal ini berarti merangkum, memilih hal pokok,

Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 329.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 334.

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, serta membuang sesuatu yang tidak penting. Apabila telah dilakukan reduksi data, maka data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan dan pencarian data selanjutnya.³⁹

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dalam bentuk uraian, bagan atau teks dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. Penyajian data merupakan kelanjutan dari reduksi data dan diharapkan dengan penyajian data akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi serta merencanakan langkah kerja selanjutnya.⁴⁰

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah ketiga atau langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukannya bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada awal didukung dengan bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab dari rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal namun bisa juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁴¹ Kesimpulan yang disampaikan penulis berupa analisis SWOT terhadap

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 338.

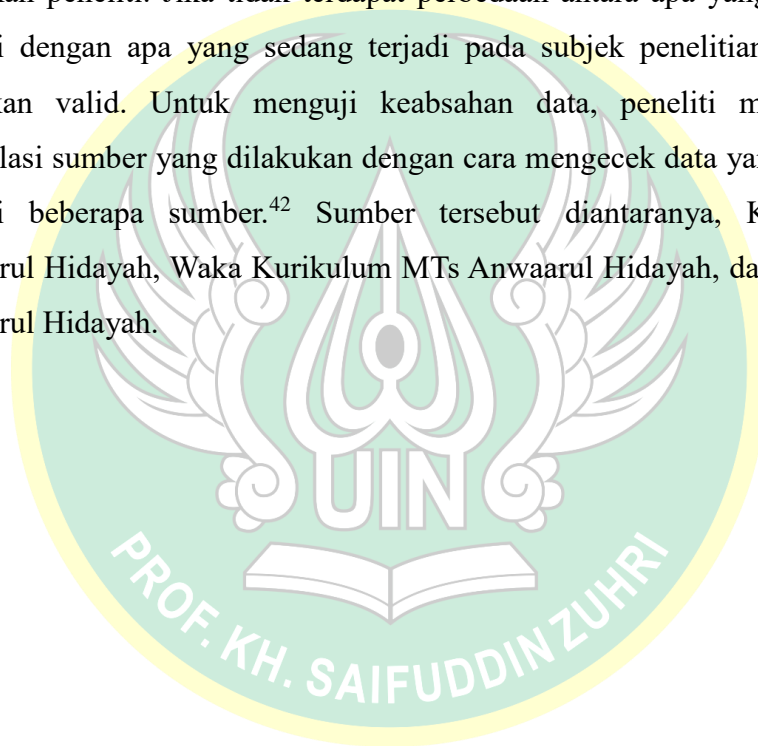
⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 341.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*..., hlm. 345.

kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif di madrasah.

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk menunjukkan tingkat keakuratan antara data yang diperoleh peneliti di lapangan dengan subjek penelitian yang dilakukan peneliti. Jika tidak terdapat perbedaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sedang terjadi pada subjek penelitian maka data dikatakan valid. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.⁴² Sumber tersebut diantaranya, Kepala MTs Anwaarul Hidayah, Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah, dan Guru MTs Anwaarul Hidayah.



⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 191.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. MTs Anwaarul Hidayah

1. Sejarah Singkat MTs Anwaarul Hidayah⁴³

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anwaarul Hidayah merupakan sebuah lembaga pendidikan islam swasta tingkat dasar menengah yang berada di Jl. Lingkar Utara Desa Karangnangka RT 03 RW 01 Kecamatan Kedungbanteng kabupaten Banyumas. Lembaga ini berada di bawah naungan Yayasan Anwaarul Hidayah Karangnangka sebagai sebuah payung hukum resmi dalam berjalannya organisasi. Dalam pendiriannya, MTs Anwaarul Hidayah merupakan inisiasi dari pengurus Yayasan dan juga pengasuh pondok peantren Anwaarul Hidayah untuk tetap terus mengembangkan pendidikan sebagai tonggak utama kemajuan bangsa. Sehingga pada akhirnya pada hari Kamis 14 Mei 2020 atas dasar Surat Keputusan Kementerian Agama Wilayah Jawa Tengah nomor : 3412/KW.11.2/5/PP.03.2/5/2020 berdirilah sebuah lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama yang diberi nama “Madrasah Tsanawiyah (MTs) Anwaarul Hidayah”. Yang kemudian pada hari itu pula madrasah mendapatkan izin operasional sebagai bahan dasar legalitas berjalannya lembaga.⁴⁴

Pendirian MTs Anwaarul Hidayah didasari atas kebutuhan dan perhatian khusus dari pengurus yayasan guna untuk tetap ikut andil dalam membangun proses pendidikan baik pendidikan formal maupun non formal. MTs Anwaarul Hidayah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berafiliasi dengan Pondok Pesantren Anwaarul Hidayah sehingga dalam hal ini membuat kajian keilmuan di dalam MTs Anwaarul Hidayah semakin kompleks dan komprehensif, yaitu memadukan ilmu-ilmu umum(sains) dengan kajian ilmu agama islam. Hal ini sangat relevan dalam perkembangan

⁴³ Arsip MTs Anwaarul Hidayah dan Wawancara dengan Bapak Miftahul Ihsan, S.Pd. Tanggal 10/02/2023.

⁴⁴ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ihsan, S. Pd. Selaku Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah. Tanggal 10/02/2023

zaman yang semakin canggih namun juga tetap harus di kontrol dengan adanya keseimbangan ilmu agama. Dengan Visi : ***”Terwujudnya Generasi Islami Yang Santun, Berprestasi Serta Berwawasan Lingkungan”***, menjadi semangat tersendiri bagi pengelola madrasah untuk tetap berusaha memajukan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan.

2. Profil MTs Anwaarul Hidayah⁴⁵

a. Identitas Lembaga

Nama	: MTs ANWAARUL HIDAYAH KEDUNGBANTENG
NPSN	: 70008555
NSM	: 121233020058
Alamat	: Jl. Lingkar Utara Desa Karangangka RT 03 RW 01, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152, Indonesia.
No. Telephone	: 0813 3881 8809
E-mail	: mtsanwaarulhidayah1@gmail.com
Web	: -
Status	: Swasta
Bentuk Pendidikan	: Madrasah Tsanawiyah (MTs)/ <i>Boarding School</i>
Status Kepemilikan	: Yayasan
Nama Yayasan	: Yayasan Anwaarul Hidayah Karangangka
Alamat Yayasan	: Jl. Lingkar Utara Desa Karangangka RT 03 RW 01, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152, Indonesia.
SK Izin Operasional	: 3412/KW.11.2/5/PP.03.02/5/2020
Tanggal SK Izin Operasional	: 14 Mei 2020

⁴⁵ Arsip MTs Anwaarul Hidayah

Waktu Penyelenggaraan : Pagi
 Sertifikasi ISO : -
 Nama Kepala Sekolah : Casiko, S.Kom.
 Akreditasi : -
 Kurikulum : 2013
 Kepemilikan Tanah & Bangunan
 1. Luas Tanah/Status : 1469 m²
 2. Luas Bangunan : 650 m²
 No. Rekening Sekolah : 6833-01-01-8645-53-8
 (An. MTS ANWAARUL HIDAYAH)
 BRI UNIT KARANGSALAM
 PURWOKERTO
 NPWP : 95.742.755.2-521.000
 MTS ANWAARUL HIDAYAH

b. Visi dan Misi Madrasah

1. Visi Madrasah

Untuk itu MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka kedungbanteng Kabupaten Banyumas merumuskan visi sebagai berikut:

"Terwujudnya Generasi Islami Yang Santun, Berprestasi Serta Berwawasan Lingkungan".

2. Misi Madrasah

Demi mewujudkan Visi tersebut, MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka Kedungbanteng kemudian menyusun Misi yang hendak dicapai untuk menyukseskan visi tersebut. Misi MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka kedungbanteng adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan mutu kegiatan belajar dan mengajar;
- b. Menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan serta berakhlak mulia melalui pengamalan ajaran islam;

- c. Menumbuh kembangkan nilai-nilai akhlakul karimah di lingkungan madrasah;
- d. Melaksanakan program pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, efektif dan menyenangkan.
- e. Meningkatkan manajemen pendidikan guna mencapai PELAYANAN PRIMA (Pantas, Empati, Langsung, Akurat, Yakin, Aman, Nyaman, Alat, Nyata, Perkataan, Rahasia, Informasi, Mudah, Ahli);
- f. Menjalin kerja sama dengan berbagai instansi dan elemen masyarakat guna menunjang keberhasilan pencapaian tujuan pendidikan.
- g. Membangun dan mengembangkan komitmen cinta kehidupan, alam dan lingkungan.

c. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.
6. Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga MTs Anwaarul Hidayah.
7. Tata Tertib MTs Anwaarul Hidayah.

d. Daftar Personalia & Struktur Organisasi MTs Anwaarul Hidayah

1. Daftar Personalia

No	Nama	Jenis Kelamin	Riwayat Pendidikan
1	Miftakhul Ikhsan, S.Pd.	Laki-laki	S1 (Manajemen Pendidikan Islam)
2	Nisa Fitri Amatullah, S.Pd.	Perempuan	S1 (Pendidikan Biologi)
3	Diah Meilynda, S.Pd.	Perempuan	S1 (Pendidikan Bahasa Inggris)
4	Nur Afifah, S.Pd.	Perempuan	S1 (Pendidikan Agama Islam)
5	Eva Nur Fadhillah, S.Pd.	Perempuan	S1 (Pendidikan Agama Islam)
6	Azka Silma Awawina, S.Sos.	Perempuan	S1 (Bimbingan Konselling Islam)
7	Imam Hatim, S.Pd.	Laki-laki	S1 (Pendidikan Agama Islam)
8	Eri Alfiyah, S.Sos.	Perempuan	S1 (Pengembangan Masyarakat Islam)
9	Adian Akbar Khoirullah, S.Pd.	Laki-laki	S1 (Pendidikan Agama Islam)
10	Anwar Maulidin, S.Pd.	Laki-laki	S1 (Pendidikan Bahasa Arab)
11	Andini Stella Devi, S.Pd.	Perempuan	S1 (Pendidikan Geografi)
12	Rohmah Purwanti, S.E.	Perempuan	S1 (Ekonomi Syariah)
13	Solihin S.Sos.	Laki-laki	S1 (Manajemen Dakwah)
14	Wili Bagus Andriyan, S.Pd.	Laki-laki	S1 (Tadris Matematika)

2. Susunan Pengurus MTs Anwaarul Hidayah

SUSUNAN PENGURUS MTs ANWAARUL HIDAYAH TAHUN 2021/2022

Penanggung Jawab	:	YAYASAN ANWAARUL HIDAYAH
Komite Madrasah	:	KARSONO
Kepala Madrasah	:	AZKA SILMA AWAWINA, S.Sos.
Bendahara		
a. Bendahara I	:	ERI ALFIYAH, S.Sos.
b. Bendahara II	:	ROHMAH PURWANTI, S.E.
Kepala Tata Usaha	:	EVA NUR FADHILLAH, S.Pd.
Waka Kurikulum	:	MIFTAKHUL IKHSAN, S.Pd.
Waka Kesiswaan	:	IMAM HATIM, S.Pd.
Waka Humas	:	ANWAR MAULIDIN, S.Pd.
Waka sarana dan Prasarana	:	-
Kepala Laboratorium	:	NISA FITRI AMATULLAH, S.Pd.
Kepala Perpustakaan	:	DIAH MEILYNDA, S.Pd.
Koperasi	:	NUR AFIFAH, S.Pd.
Wali Kelas		
a. Kelas VII	:	NUR AFIFAH, S.Pd.
b. Kelas VIII	:	NISA FITRI AMATULLAH, S.Pd.

3. Daftar Siswa Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah Tahun 2022/2023⁴⁶

No.	NAMA	Jenis Disabilitas	Alamat
1.	Bagus Wicaksono	Fisik	Karangnangka, Kedungbanteng
2.	Dimas Saputra	Lamban Belajar	Karangnangka, Kedungbanteng
3.	Khairunnisa Nur Azizah	Lamban Belajar	Karangnangka, Kedungbanteng
4.	Wanto	Fisik	Karangnangka, Kedungbanteng
5.	Wisnu Bagus Prastiyo	Disleksia	Karangnangka, Kedungbanteng

B. Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah

1. Faktor Kekuatan di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Adanya Dukungan Dari Kementerian Agama Melalui PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah

Keperluan merupakan sesuatu yang dikehendaki; sesuatu yang berguna; yang mempunyai kepentingan; yang menjadi keharusan atau kemestian kepada seorang individu untuk dipenuhi. Keperluan ini berupaya menggerakkan individu ke arah matlamat tertentu⁴⁷. Aspek keperluan ini penting kepada setiap individu untuk menentukan tahap motivasi mereka dan dapat membantu mempengaruhi perlakuan seseorang. Menurut Aldefer, keperluan adalah keinginan manusia kepada tiga peringkat, yaitu keperluan kepada hubungan yang bermakna dengan individu lain; keperluan kepada kebendaan; dan keperluan kepada kemajuan.

⁴⁶ Dokumen Siswa MTs Anwaarul Hidayah

⁴⁷ Direktorat Pembinaan SLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Depdiknas : Jakarta

Apabila melihat pernyataan Aldefer, maka adanya dukungan masuk ke dalam salah satu dari tiga poin kunci yang dikemukakan oleh Aldefer, yaitu poin yang menyoal kepada “hubungan yang bermakna dengan individu lain”. Jika dikaitkan dengan konteks dalam penelitian ini, maka dukungan dari Kementerian Agama melalui PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah kepada MTs Anwaarul Hidayah merupakan salah satu bukti hubungan yang bermakna, sebab di dalamnya terkandung kebermanfaatannya dan kerja sama yang konkret.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan dari Bapak Miftahul Ikhsan, S.Pd., selaku Waka Kurikulum di MTs Anwaarul Hidayah yang mengatakan bahwa selama kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh MTs Anwaarul Hidayah kepada para siswa ABK secara inklusif mendapat dukungan penuh dengan adanya PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, sebab dengan adanya PMA tersebut, MTs Anwaarul Hidayah lebih terbantu dalam menyusun petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang diberlakukan kepada para siswa, khususnya siswa ABK, serta memberikan dorongan moril berupa terbangunnya rasa kepercayaan diri bagi pihak MTs Anwaarul Hidayah. Di sisi lain, dukungan materil sesekali juga diberikan. Dukungan materil tersebut berupa sumbangsih pendanaan untuk operasional sekolah, tenaga pendidik, dan pengembangan sarana prasarana sekolah⁴⁸.

Lebih jauh lagi, menurut Ibu Azka Silma Awawina, S.Sos., selaku Kepala MTs Anwaarul Hidayah, dan Ibu Nisa Fitri Amatullah, S.Pd., selaku dewan guru yang mengampu kegiatan belajar mengajar siswa ABK, bentuk dukungan tersebut dirasa amat membantu proses kegiatan belajar mengajar di MTs Anwaarul Hidayah, terlebih apabila dukungan yang diberikan tidak hanya berupa dukungan materil, melainkan juga dukungan moril, dengan harapan bahwa MTs Anwaarul Hidayah menjadi

⁴⁸ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ikhsan, S.Pd., selaku Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah. Rabu, 25 Januari 2023. Pukul 13.30 s/d selesai.

lebih mantap dalam memproyeksikan langkah yang akan diambil oleh *stakeholder*-nya di kemudian hari⁴⁹.

b. Berkembangnya Mental Siswa ABK Menjadi Lebih Mandiri Dalam Mengikuti Kegiatan Belajar Bersama Siswa Reguler.

Selain memberikan bekal secara kognitif dan psikomotorik kepada para peserta didik, khususnya ABK, pendidik juga senantiasa menanamkan nilai-nilai moral guna membentuk karakter para peserta didik. Upaya memberikan pendidikan karakter ini menjadi penting sebab hal tersebut akan menjadi bekal bagi para siswa dalam beradaptasi dengan lingkungan sosialnya, terlebih apabila pendidikan karakter tersebut diberikan sedini mungkin kepada para siswa, khususnya ABK. Pembentukan karakter bagi anak usia dini dilakukan melalui upaya mengenalkan berbagai kebaikan, menanamkan rasa cinta kepada kebaikan, dan membiasakan anak untuk melakukan kebaikan⁵⁰. Pergaulan antara peserta didik inklusif dan reguler juga tidak ada kendala, peserta didik reguler sudah bisa menerima kehadiran peserta didik inklusif dalam kehidupan mereka walaupun terkadang terdapat perbedaan persepsi antara peserta didik reguler dan peserta didik ABK, sebab baik siswa reguler maupun siswa ABK belum saling memahami satu sama lain sepenuhnya⁵¹.

Apabila mengacu pada hasil wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S.E., selaku pengampu kegiatan belajar mengajar para siswa inklusif, beliau mengatakan bahwa kemandirian para siswa inklusif ini sebenarnya mudah untuk ditumbuhkan jika mereka mendapatkan stimulasi yang proporsional, dalam arti tidak terlalu berlebihan dan dengan jeda waktu tertentu. Sebaliknya, jika stimulasi tersebut cenderung

⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Azka Silma A., S. Sos., selaku Kepala MTs Anwaarul Hidayah. Sabtu 28 Januari 2023. Pukul 16.00 s/d selesai.

⁵⁰ Novan Ardy Wiyani. (2017). Perencanaan Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto. Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Anak Vol. 3 No. 2. 2017

⁵¹ Bandi Delphie. (2010). Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi. Refika Aditama : Bandung

berlebihan, yang terjadi justru para siswa ABK akan menunjukkan tanda-tanda kebosanan dalam proses belajar mengajar. Hal inilah yang kemudian seringkali dihindari oleh tenaga pendidik, sebab untuk kembali membuat siswa ABK bersemangat tidaklah mudah dan cenderung membutuhkan waktu yang cukup lama⁵².

c. Evaluasi Dilakukan Secara Bersama Antara Siswa Reguler Dan ABK Tanpa Membedakan Satu Sama Lain

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi dan dampak untuk membantu membuat suatu keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman tentang fenomena yang terlibat. Evaluasi juga merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan. Pendapat lainnya tentang definisi evaluasi adalah usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial dari kebijakan atau program, dan bukan sekedar mengumpulkan informasi tentang keluaran tindakan kebijaksanaan baik yang diperkirakan sebelumnya maupun yang tidak diperkirakan.

Evaluasi juga didefinisikan sebagai identifikasi, klarifikasi dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu obyek yang dievaluasi, baik berupa nilai maupun jasa dalam kaitannya dengan kriteria tersebut. Sedangkan menurut Owen, evaluasi merupakan suatu penilaian layak dari sebuah program dan hasil pengetahuan berdasarkan penelitian secara sistematis untuk membantu pengambilan keputusan tentang suatu program. Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan informasi dan menentukan nilai dan manfaat obyek evaluasi, mengontrol, memperbaiki

⁵² Wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S. E., selaku dewan guru yang mengampu siswa ABK MTs Anwaarul Hidayah. Sabtu 28 Januari 2023. Pukul 13.00 s/d selesai.

dan mengambil keputusan mengenai obyek. Evaluasi juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan obyektif tentang suatu program⁵³.

Selain tujuan tersebut evaluasi juga memiliki tujuan lainnya yaitu untuk menunjukkan pada penggunaan metode penelitian, menekankan pada hasil suatu program, penggunaan kriteria untuk menilai dan memberikan kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.

Merujuk pada penggalan singkat perihal evaluasi, dalam implementasinya, pendidikan inklusif pun perlu dilakukan adanya sebuah evaluasi. Pada MTs Anwaarul Hidayah, kegiatan evaluasi dilakukan dua kali dalam satu semester, yaitu pada triwulan pertama dan triwulan kedua yang melibatkan seluruh elemen sekolah meliputi dewan guru dan tenaga pendidik, perwakilan siswa, serta wali siswa⁵⁴.

2. Faktor Kelemahan di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Media Pembelajaran Sangat Kurang Memenuhi Syarat Pembelajaran ABK

Terkait hasil temuan penelitian, kesulitan yang dihadapi guru dalam aspek kegiatan pelaksanaan pembelajaran khususnya dalam menyajikan/menyampaikan materi dan menggunakan alat/media pembelajaran menunjukkan bahwa guru merasa kesulitan dikarenakan harus memberikan penjelasan dan mendemonstrasikan alat/media secara berulang-ulang kepada ABK. Kondisi ini disebabkan selain alat/media yang digunakan kondisinya sangat terbatas, juga

⁵³ Istiningsih. (2008). *Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali*. (<http://etd.eprints.ums.ac.id/7014/1/Q100030097.pdf>)

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ikhsan, S. Pd., selaku Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah. Senin, 30 Januari 2023. Pukul 14.00 s/d selesai.

dikarenakan guru kurang menggunakan alat/media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan karakteristik ABK⁵⁵.

Kurangnya APE (Alat Peraga Edukasi) bagi kegiatan belajar mengajar siswa ABK amat dirasakan dampaknya. Pada kenyataannya, alat peraga atau media harus disesuaikan dengan ABK, guna memaksimalkan kegiatan belajar mengajar yang sedang dilaksanakan. Beberapa alat peraga ini antara lain seperti huruf braile untuk penyandang tuna netra, sempoa berukuran sedang untuk ABK yang lamban dalam belajar, kemudian ada pula penggunaan video tutorial untuk penyandang tuna rungu, dan beberapa alat yang lain yang disesuaikan dengan kebutuhan ABK⁵⁶.

Hasil temuan ini belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif, padahal Nasution menegaskan bahwa semua alat/media pengajaran sama baiknya dan tidak ada satupun yang melebihi yang lain dalam segala hal. Selanjutnya Nasution juga mengemukakan bahwa pada umumnya alat/media tertentu tidak menunjukkan keunggulannya pada orang tertentu. Sedangkan hasil temuan penelitian kesulitan yang dihadapi guru dalam aspek kegiatan evaluasi pembelajaran khususnya dalam penilaian hasil belajar siswa menunjukkan bahwa guru merasa kesulitan dalam memberikan penilaian kepada ABK dikarenakan tidak adanya petunjuk dan panduan yang baku sehingga penilaian yang diberikan guru kepada ABK lebih bersifat subyektif.

Kondisi ini juga belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif yang diselenggarakan. Berdasarkan hasil temuan penelitian komponen produk terhadap perkembangan aspek akademik ABK menunjukkan bahwa perolehan nilai hasil belajar ABK dinilai cukup menggembirakan, artinya ABK

⁵⁵ Hamalik. (2004). *Media Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

⁵⁶ Wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S. E., selaku Guru Pengampu siswa ABK. Senin 30 Januari 2023. Pukul 13.00 s/d selesai.

yang mengikuti ujian dapat dinyatakan lulus seluruhnya, dan bahkan ada beberapa ABK yang memperoleh nilai melebihi nilai rata-rata kelas, di samping itu terdapat pula ABK yang memperoleh nilai di bawah nilai rata-rata kelas. Sedangkan hasil temuan penelitian terhadap perkembangan aspek sosial siswa menunjukkan hasil yang sangat bagus.

Hasil temuan ini dinilai sudah sesuai dengan kriteria penyelenggaraan pendidikan inklusif dan ini diperkuat pendapat Ambar Arum menyatakan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya menekankan pencapaian tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi akademik tetapi juga kompetensi sosial. Ini berarti bahwa dengan adanya program pendidikan inklusif, siswa normal lebih menerima keberagaman dan perbedaan serta memahami kondisi teman bermainnya yang berkelainan.

b. Kurikulum Yang Dipakai Belum Memenuhi Standar ABK

Berdasarkan Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 2013 menyatakan bahwa Program Pendidikan Inklusif (PPI) artinya suatu program pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas yang dihadiri oleh murid berkeperluan pendidikan khas bersama-sama dengan murid lain dalam kelas yang sama di sekolah kerajaan atau sekolah bantuan kerajaan. Mengikuti Nind et al, inklusif bermaksud membekalkan semua murid di dalam kelas arus perdana dengan program pendidikan bermakna dan mencabar yang mana kemudian menggerakkan keupayaan mereka selain keperluan mereka dipenuhi dengan sebaik mungkin melalui pelbagai sumber sokongan dan bantuan⁵⁷.

Bagi sekolah yang menjalankan program inklusif mereka perlu lebih daripada itu. Sekolah merupakan kepunyaan semua, maka semua

⁵⁷ Idayu-Walentiningsih. (2011). *Pakem Sekolah Inklusif*. Malang :Bayu Media Publishing.

warganya diterima, diberikan sokongan dan dibantu juga oleh rekan-rekan sebaya serta komunitas sekolah tersebut dalam usaha untuk mendapatkan keperluan pendidikan yang mereka perlukan. PPI adalah program untuk ABK yang mampu mengikuti kurikulum kebangsaan belajar bersama-sama murid lain dalam kelas yang sama. Program ini bertujuan memberi peluang kepada ABK mengikuti program akademik dan bukan akademik bersama-sama murid normal arus perdana.

Sudah sewajarnya jika pihak sekolah, dalam hal ini adalah MTs Anwaarul Hidayah untuk bertindak lebih sigap menyikapi keterbatasan kurikulum yang diterapkan untuk ABK. Dalam berjalannya proses belajar mengajar, biasanya ABK akan mengikuti siswa reguler di dalam kelas yang telah disediakan. Tidak berhenti sampai di situ, pihak sekolah terus mengupayakan untuk memberikan pendidikan terbaik bagi para peserta didiknya, khususnya mereka yang masuk pada kategori ABK, agar tujuan diterapkannya pendidikan inklusif dapat memiliki dampak yang signifikan bagi tumbuh kembang ABK⁵⁸.

c. Sarana Dan Prasarana Belum Mengakomodasi Kebutuhan ABK

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif. Sekolah inklusif merupakan perkembangan baru dari pendidikan terpadu. Pada sekolah inklusif setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya, semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan/atau penyesuaian,

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ikhsan, S. Pd., selaku Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah. Senin 30 Januari 2023. Pukul 14.00 s/d selesai.

mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai pada sistem penilaiannya⁵⁹.

Dengan kata lain pendidikan inklusif mensyaratkan pihak sekolah yang harus menyesuaikan dengan tuntutan kebutuhan individu peserta didik, bukan peserta didik yang menyesuaikan dengan sistem persekolahan. Keuntungan dari pendidikan inklusif anak berkebutuhan khusus maupun anak biasa dapat saling berinteraksi secara wajar sesuai dengan tuntutan kehidupan sehari-hari di masyarakat, dan kebutuhan pendidikannya dapat terpenuhi sesuai potensinya masing-masing. Konsekuensi penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah pihak sekolah dituntut melakukan berbagai perubahan, mulai cara pandang, sikap, sampai pada proses pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan individual tanpa diskriminasi⁶⁰.

Penyelenggaraan sekolah inklusi memang membutuhkan sarana dan prasarana yang banyak, karena sekolah inklusi harus mampu mengakomodasi semua kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Misalnya kelas untuk bimbingan khusus, jalan khusus anak tuna daksa, alat bantu pendengaran untuk anak tuna rungu, buku braile untuk anak tuna netra, dan sebagainya. Keterbatasan sarana dan prasarana berdampak pada kurangnya pelayanan yang diberikan sekolah bagi anak dengan kebutuhan khusus. Masalah utama minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki adalah faktor biaya.

d. Belum Adanya Guru Pendamping Khusus Yang Memadai ABK.

Pernyataan dari Ibu Rohmah Purwanti, S.E., selaku salah satu dewan guru di MTs Anwaarul Hidayah adalah bahwa guru reguler yang ada tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana pendidikan inklusif secara

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S.E., selaku Guru Pengampu ABK. Senin 30 Januari 2023. Pukul 13.00 s/d selesai.

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Imam Hatim, S.Pd., Selaku waka kesiswaan. Tanggal 11/02/2023.

komprehensif, sehingga pemahamannya sangat terbatas⁶¹. Disamping itu, guru juga tidak ada pengalaman berinteraksi dengan ABK, tidak pernah ada pelatihan tentang bagaimana menangani ABK. Di samping itu sikap dasar guru ini telah dibentuk oleh budaya memberikan label negatif pada ABK. Sikap ini akan mengarahkan atau melandasi perilaku guru terhadap proses pembelajaran di kelas terutama terhadap ABK. Faktor internal individu sangat mempengaruhi pembentukan sikap yang memegang peranan dalam menentukan bagaimana perilaku seseorang di dalam lingkungannya.

3. Faktor Peluang di MTs Anwarul Hidayah dalam penerapan kebijakan pendidikan inklusif

a. Menambah Serta Memperkuat Relasi dan Jaringan Dalam Rangka Mengembangkan Sekolah Inklusif.

Pada mulanya pelaksanaan pendidikan inklusif memang ada sikap penolakan dari orangtua peserta didik dan guru reguler dengan keberadaan peserta didik inklusif, hal itu karena ketidakpahaman tentang pendidikan inklusif. Ada kekhawatiran bahwa anak-anak mereka akan tidak berkembang jika dikumpulkan dengan peserta didik inklusif. Seperti di sampaikan Garrett, yang menyatakan bahwa salah satu faktor terkuat dalam pembentukan sikap adalah faktor budaya masyarakat⁶². Budaya, kebiasaan atau tradisi masyarakat yang mempunyai anak inklusif selama ini adalah, mengirim peserta didik inklusif ke Sekolah Luar Biasa atau pendidikan model segregasi. Hal ini berarti mereka menghendaki agar peserta didik inklusif harus disekolahkan secara khusus tidak boleh belajar bersama peserta didik reguler.

Jika dilihat dari teori belajar Thorndike, maka sikap penolakan guru terhadap paradigma baru atau pendidikan inklusif merupakan sebuah reaksi ketidaksiapan (*Law of readiness*) yang dipaksakan dalam pembelajaran bersama ABK yang menuntut pengetahuan dan ketrampilan baru yang selama

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S.E., selaku Dewan Guru Pengampu Siswa ABK MTs Anwaarul Hidayah. Kamis 2 Februari 2023. Pukul 10.00 s/d selesai.

⁶² Ichrom. (2007). *Merangkul Perbedaan*. Jakarta :Dirjen Manajemen Dikdasmen.

ini tidak pernah dilakukan (*law of exercise*). Guru reguler yang ada tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana pendidikan inklusif secara komprehensif sehingga pemahamannya sangat terbatas. Disamping itu, guru juga tidak ada pengalaman berinteraksi dengan ABK, tidak pernah ada pelatihan tentang bagaimana menangani ABK⁶³.

Di samping itu sikap dasar guru ini telah dibentuk oleh budaya memberikan label negatif pada ABK. Sikap ini akan mengarahkan atau melandasi perilaku guru terhadap proses pembelajaran di kelas terutama terhadap ABK. Faktor internal individu sangat mempengaruhi pembentukan sikap yang memegang peranan dalam menentukan bagaimana perilaku seseorang di dalam lingkungannya.

Disadari atau tidak, pemberian stimulasi secara berkala dalam intensitas waktu yang telah ditentukan dapat merangsang pertumbuhan dan perkembangan ABK. Sejauh ini, banyak hal-hal positif yang bisa dilihat perubahannya pada diri ABK, mulai dari hal-hal yang bersifat personal hingga hal-hal yang bersifat komunal. Signifikansi peningkatan kepercayaan diri pada ABK adalah salah satu bukti perkembangan yang terjadi pada mental ABK⁶⁴.

Dari capaian hasil belajar siswa ABK di MTs Anwaarul Hidayah tersebut, menjadi dasar yang bisa dibuktikan kepada pihak lain dalam rangka membangun kerja sama, menebar hubungan timbal-balik yang saling menguntungkan, atau bahkan memperkuat hubungan yang sudah terbentuk sebelumnya. Bernegosiasi dengan memaparkan hasil belajar merupakan salah satu upaya yang sesuai dengan peraturan dan petunjuk perundang-undangan terus dilakukan agar dukungan demi dukungan dari pihak lain terus mengalir⁶⁵.

⁶³ Hildegum O.(2003). *Pendidikan Inklusif suatu Strategi menuju Pendidikan untuk Semua* Mataram: Direktorat PSLB

⁶⁴ Wawancara dengan Ibu Rohmah Purwanti, S.E., selaku Guru Pengampu ABK. Kamis 2 Februari 2023. Pukul 10.00 s/d selesai.

⁶⁵ Wawancara dengan Ibu Azka Silma A., S.Sos. Tanggal 03/02/2023.

b. Memberi Contoh Kepada Sekolah Lain Untuk Ikut Serta Menerapkan Sekolah Berbasis Inklusif

Penyelenggaraan pendidikan inklusif menuntut pihak sekolah melakukan penyesuaian, baik dari segi kurikulum, sarana prasarana pendidikan, maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan individu peserta didik. Untuk itu proses identifikasi dan asesmen yang akurat perlu dilakukan oleh tenaga yang terlatih dan atau profesional di bidangnya untuk dapat menyusun program pendidikan yang sesuai dan objektif.

Implementasi pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah diharapkan mampu menjadi lokomotif dan *role model* pembaruan wajah pendidikan di daerah setempat, sebab mengingat hari ini banyak ABK yang belum tersentuh pendidikan sama sekali. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidaktertutupan tersebut, dan yang paling dominan adalah faktor tenaga pendidik dan sarana prasarana. Namun demikian, pendidikan tetap harus disampaikan bagaimana pun caranya⁶⁶.

4. Faktor Tantangan Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif

a. Proses Adaptasi Terhadap Lingkungan Yang Terbilang Cukup Lama

Pengajaran menurut Mook, merupakan sesuatu aktivitas yang diusahakan bersama-sama antara guru dengan murid. Pengajaran ini dirancang oleh guru secara sistematis melalui kaidah dan teknik yang sesuai, membimbing dan memotivasi murid demi memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran. Pengajaran juga merupakan satu aktivitas intelektual yang bertujuan untuk membawa perubahan dari segi nilai dan kepercayaan⁶⁷. Melalui pengajaran perubahan ke arah kebaikan akan berlaku sama ada dari segi pengetahuan, pemikiran, tingkah laku, nilai maupun kepercayaan.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ikhsan, S. Pd., selaku Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah. Senin 30 Januari 2023. Pukul 16.00 s/d selesai.

⁶⁷ Rahman, A. (2009). *Peran Pendidikan Inklusif Bagi anak berkelainan*. Yogyakarta:Printa

Namun demikian, proses pengajaran terhadap siswa ABK tidak lepas dari peran serta lingkungan yang ikut menopang keberhasilannya. Kebanyakan dari wali siswa masih memiliki pandangan yang cenderung negatif kepada siswa ABK menyoal karakteristik dasar mereka yang dinilai tidak mampu mengikuti perkembangan siswa reguler pada umumnya. Hal ini menjadi tantangan yang cukup kompleks bagi pihak MTs Anwaarul Hidayah mengingat banyak pihak yang terlibat dalam proses ini. Dalam proses adaptasinya, pihak sekolah tetap mengedepankan pendekatan yang lebih humanis kepada semua pihak yang terlibat, dalam hal ini kepada wali siswa dan lingkungan sekitar⁶⁸.

b. Proses Sosialisasi Terhadap Lingkungan Tentang Sekolah Inklusif Yang Memerlukan Kecakapan Ekstra

Anak berkebutuhan khusus dianggap sebagai sosok yang tidak berdaya dan perlu dikasihani. Hal inilah yang menjadikan anak berkebutuhan khusus sering dikucilkan atau termarginalkan dari lingkungan sekitar. Anak-anak berkebutuhan khusus sering menerima perlakuan yang diskriminatif dari orang lain. Bahkan untuk menerima pendidikan saja mereka sulit. Beberapa sekolah reguler tidak mau menerima mereka sebagai siswa. Alasannya guru di sekolah tersebut tidak memiliki kualifikasi yang memadai untuk membimbing anak berkebutuhan khusus. Terkadang sekolah khusus letaknya jauh dari rumah mereka, sehingga banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak mengenyam pendidikan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu disediakan berbagai layanan pendidikan atau sekolah bagi anak berkebutuhan khusus, baik menyangkut sistem pembelajaran, fasilitas yang mendukung, maupun peran guru yang sangat penting untuk memberikan motivasi dan arahan yang bersifat membangun. Sekolah yang dianggap tepat untuk anak berkebutuhan khusus adalah sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah reguler yang disesuaikan dengan kebutuhan anak yang memiliki kelainan dan memiliki

⁶⁸ Wawancara dengan Bapak Miftahul Ihsan, S.Pd. Tanggal 10/02/2023.

potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada satu kesatuan yang sistemik. Seiring berjalannya waktu penyelenggaraan sekolah inklusi menghadapi berbagai tantangan baik yang berasal dari dalam maupun dari luar sekolah. Tantangan yang bersal dari dalam salah satunya adalah ketidaksiapan guru dalam mengajar anak berkebutuhan khusus di kelas inklusi.

Namun demikian, dari faktor ketidaksiapan tersebut justru memberikan dampak positif bagi pola pengajaran guru. Guru senantiasa harus memperbarui kemampuan dan kompetensinya guna mengikuti perkembangan zaman sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab kepada para siswa ABK. Dengan terus berinovasinya guru, diharapkan akan menjadi salah satu bentuk pelayanan terbaik kepada para ABK yang notabene tidak sama dalam mendapatkan pengajaran seperti para siswa reguler lainnya⁶⁹.

Memberikan pengertian perihal sekolah inklusif lewat sosialisasi terbuka selalu digalakkan, mengingat dalam hal ini pihak sekolah terbilang cukup kerepotan menghadapi keluhan para wali siswa reguler dengan hadirnya siswa ABK. Seiring berjalannya waktu, keselarasan dan harmonisasi mulai terbentuk walaupun tidak melalui proses yang instan. Strategi dan pendekatan yang digunakan dalam proses sosialisasinya pun banyak perbedaan dengan proses sosialisasi yang diberikan berkaitan dengan siswa reguler⁷⁰.

c. Penguatan Komunikasi Antara Pihak Sekolah dan Pihak Wali Siswa ABK Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Persepsi

Terlepas dari kenyataan bahwa model inklusi merupakan sekolah yang konsisten dengan gagasan keadilan sosial yang mendukung prinsip normalitas, ada banyak keuntungan yang diperoleh dari sekolah inklusi ini. Sekolah inklusi dianggap dapat memberi berbagai manfaat, baik bagi masyarakat umum maupun bagi anak luar biasa sendiri. Masyarakat akan mulai mau menerima keberadaan anak luar biasa⁷¹. Selain itu di sekolah inklusi juga memungkinkan

⁶⁹ Wawancara dengan Ibu Azka Silma Awawina, S. Sos., selaku Kepala MTs Anwaarul Hidayah. Sabtu 21 Januari 2023. Pukul 15.30 s/d selesai.

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Azka Silma A., S.Sos, Tanggal 21/01/2023.

⁷¹ Sunaryo, (2009). *Manajemen Pendidikan Inklusif*, Bandung: Universitas Pendidikan

anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak normal, dan diperlakukan selayaknya anak normal. Hal tersebut berdampak pada psikologis anak berkebutuhan khusus, yaitu memberikan kesempatan bagi perkembangan kepercayaan diri anak berkebutuhan khusus (*self esteem*).

Self esteem merupakan bagian dari *self concept* atau konsep diri. *Self esteem* adalah perasaan seseorang tentang ketidaksesuaian antara dirinya dan ingin menjadi apa nantinya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *self esteem* adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri baik itu kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Anak yang memiliki *self esteem* yang tinggi umumnya merasa dirinya berharga, sehingga mereka dapat menghargai dirinya sendiri, tetapi tetap bisa menerima kekurangan yang ada pada dirinya. Sebaliknya, anak yang memiliki *self esteem* yang rendah, merasa dirinya kurang berharga dan kekurangan yang ia sandang mempengaruhi bagaimana ia memandang dirinya sendiri.

Self esteem dapat dibangun dengan cara rasa penerimaan orang-orang di sekitar terhadap keberadaan dirinya. Anak yang diterima oleh orang-orang di sekitarnya memiliki pandangan yang positif terhadap dirinya sendiri dan merasa lebih dihormati, sehingga mampu mengembangkan potensi diri serta mencapai keberhasilan berdasarkan kekuatannya.

Untuk itulah, intensitas antar pihak-pihak yang berkaitan selalu dibangun serta ditingkatkan, dengan tujuan meminimalisasi kesalahan dan perbedaan pemahaman dalam menyikapi adanya sekolah inklusif. Seringkali dari perbedaan tersebut nantinya menyulut perdebatan yang justru akan menghambat proses belajar mengajar pada siswa ABK itu sendiri. Demi terjaganya harmonisasi dan keselarasan itulah, menjadi pribadi yang komunikatif amat diharuskan⁷².

Indonesia.

⁷² Wawancara dengan Ibu Azka Silma A., S.Sos. Tanggal 10/02/2023.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di MTs Anwaarul Hidayah Karangnangka, Kedungbanteng, Banyumas, merujuk pada faktor-faktor yang telah diteliti di atas yang mencakup kekuatan dan kelebihan (*Strength*), Kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunities*), dan ancamannya (*Threats*), peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

1. Faktor Kekuatan; a. Adanya Dukungan Dari Kementerian Agama Melalui PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah; b. Berkembangnya Mental Siswa ABK Menjadi Lebih Mandiri Dalam Mengikuti Kegiatan Belajar Bersama Siswa Reguler; c. Evaluasi Dilakukan Secara Bersama Antara Siswa Reguler Dan ABK Tanpa Membedakan Satu Sama Lain.
2. Faktor Kelemahan; a. Media Pembelajaran Sangat Kurang Memenuhi Syarat Pembelajaran ABK; b. Kurikulum Yang Dipakai Belum Memenuhi Standar ABK; c. Sarana Dan Prasarana Belum Mengakomodasi Kebutuhan ABK; d. Belum Adanya Guru Pendamping Khusus Yang Memadai ABK.
3. Faktor Peluang; a. Menambah Serta Memperkuat Relasi dan Jaringan Dalam Rangka Mengembangkan Sekolah Inklusif; b. Memberi Contoh Kepada Sekolah Lain Untuk Ikut Serta Menerapkan Sekolah Berbasis Inklusif.
4. Faktor Tantangan; a. Proses Adaptasi Terhadap Lingkungan Yang Terbilang Cukup Lama; b. Proses Sosialisasi Terhadap Lingkungan Tentang Sekolah Inklusif Yang Memerlukan Kecakapan Ekstra; c. Penguatan Komunikasi Antara Pihak Sekolah dan Pihak Wali Siswa ABK Agar Tidak Terjadi Kesalahpahaman Persepsi.

Faktor keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah yang lain tidak lepas pula pada faktor internal

kelembagaannya, yaitu adanya sikap disiplin yang tinggi dari seluruh warga madrasah, baik tenaga pendidik maupun peserta didiknya, sehingga proses kegiatan belajar menjadi lebih selaras dan lebih mudah diusahakan menuju pada tahap maksimalnya, mengingat umur dari MTs Anwaarul Hidayah sendiri yang belum mencapai satu dekade.

B. Saran

pada saat melakukan proses penelitian, peneliti benar-benar mencari informasi yang mendalam terkait kebijakan penerapan pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah. Besar harapan peneliti agar skripsi ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan yang berkaitan tentang kebijakan penerapan pendidikan inklusif pada madrasah, khususnya di MTs Anwaarul Hidayah sendiri, serta madrasah yang lain di Indonesia pada umumnya. Oleh sebab itu, peneliti menyampaikan beberapa saran perihal penelitian ini, antara lain:

a. Saran bagi Ketua Yayasan

Ketua Yayasan merupakan lokomotif pada lembaga yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, Ketua Yayasan diharapkan mampu terus mengawal perkembangan yang terjadi di lembaganya secara saksama dan optimal, sehingga lembaga yang dipimpinnya mampu terus melahirkan generasi-generasi terbaik yang siap berkompetisi dan berkontribusi pada khazanah keilmuan di Indonesia.

b. Saran bagi Kepala Madrasah

Kepala Madrasah merupakan pemegang otoritas tertinggi di dalam lembaganya, untuk itu, Kepala Madrasah diharapkan mampu untuk terus mentransformasikan lembaganya menuju pengoptimalisasian kegiatan belajar mengajar, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan inklusif, agar di kemudian hari dapat menjadi contoh bagi lembaga pendidikan yang lain.

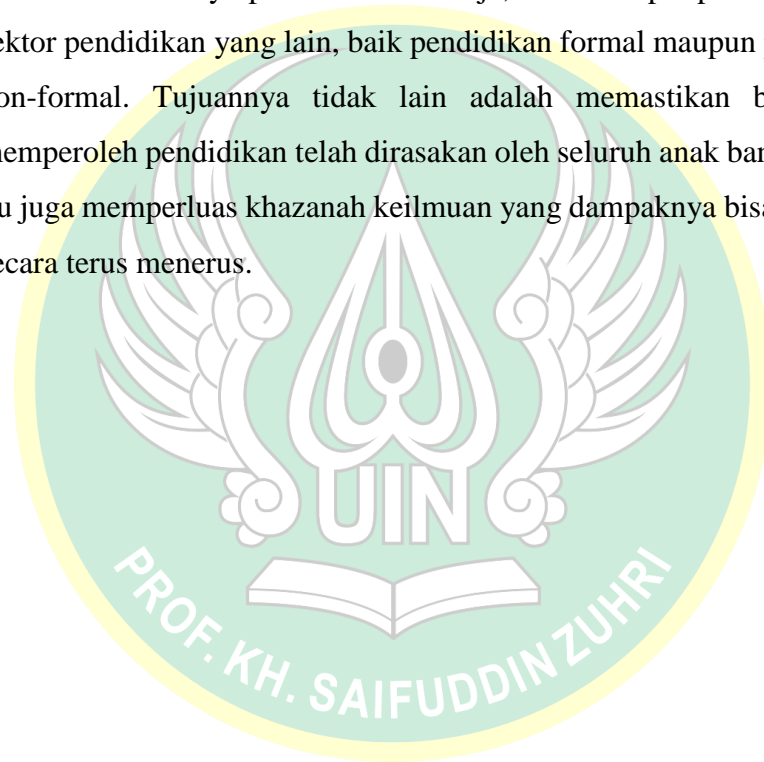
c. Saran bagi Guru

Guru merupakan sosok yang bersinggungan langsung dengan para

peserta didik yang ada di setiap lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah MTs Anwaarul Hidayah. Oleh sebab itu, dewan guru diharapkan mampu terus berinovasi dalam setiap kegiatan belajar mengajarnya, khususnya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kelas inklusif.

d. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan setelah penelitian ini, akan ada lagi akademisi yang terus mengembangkan penelitian terkait fokus tema yang sama, yaitu berkaitan dengan pendidikan inklusif. Penelitian tersebut hendaknya tidak terbatas hanya pada madrasah saja, namun dapat pula menyentuh sektor pendidikan yang lain, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Tujuannya tidak lain adalah memastikan bahwa hak memperoleh pendidikan telah dirasakan oleh seluruh anak bangsa, selain itu juga memperluas khazanah keilmuan yang dampaknya bisa dirasakan secara terus menerus.



DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Farhan dkk. 2022. *Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi*. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia. Vol. 7. No.6.
- Allen, K.E. & Cowdery. 2000. *The Exceptional Child: Inclusion in Early Childhood Education* (4 ed.). USA: Delmar Cengage Learning.
- Arifin, Zainal. 2014. *Penelitian Pendidikan: Metode dan Paradigma Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Delphie, Bandi. (2010). *Pembelajaran Anak Tunagrahita Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi*. Refika Aditama : Bandung
- Direktorat Pembinaan SLB. (2007). *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif*. Depdiknas : Jakarta
- Djudju Sudjana. (2008). *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah Untuk Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya : Bandung
- Dunn, William N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan oleh Samudra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press : Yogyakarta
- Edi Suarto. (2020). *Pengembangan Objek Wisata Berbasis Analisis SWOT*. Jurnal Geografi. Vol. 1. No. 2.
- Effendi Susanto. 2020. *Kajian Tentang Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Dengan Analisis SWOT Di SMP N Inklusi*. Jurnal Pendidikan Luar Biasa. Vol. 1. No. 2.
- Fattah, Nanang. 2014. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hal. 3
- Freire, Paulo. 2013. *Pendidikan Kaum Tertindas*. Jakarta: Pustaka LP3ES

Indonesia.

Fuadi, Kamal. 2015. *Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta*. Hikmah: Jurnal Islami Studies. Vol. 11. No. 2.

Hamalik. 2004. *Media Pendidikan*. Bandung: Sinar Baru.

Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika.

Ichrom. 2007. *Merangkul Perbedaan*. Jakarta :Dirjen Manajemen Dikdasmen.

Istiningsih. 2008. *Manajemen Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar Negeri Klego 1 Kabupaten Boyolali*. (<http://etd.eprints.ums.ac.id/7014/1/Q100030097.pdf>)

Kuncoro, Nur . 2012. *69 Kasus Hukum Mengguncang Indonesia*. Depok: Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Group).

Mayang, Anissa dkk. 2020. *Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)*. Vol. 17. No. 2.

Mayya dkk. 2019. *Analisis Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi Pada Sekolah Dasar*. Jurnal Administrasi Pendidikan. Vol. 26. No. 1.

Nana S. 2007. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, Bandung; Rosda Karya, Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan Volume 1, Nomor 2, Juli 2013; 112-121 ISSN: 2337-7623; EISSN: 2337-7615 121

Nur'aeni. 1997. *Intervensi Dini Bagi Anak Bermasalah*. Jakarta: Rineka Cipta.

O, Hildegum. 2003. *Pendidikan Inklusif suatu Strategi menuju Pendidikan untuk Semua Mataram*: Direktorat PSLB

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.

- Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif.
- Permendiknas Tahun 2008 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus.
- Rahman, A. 2009. *Peran Pendidikan Inklusif Bagi anak berkelainan*. Yogyakarta: Printa.
- Rangkuti Freddy. 2014. *Analisis SWOT Teknik Pembeda Kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Richard N.J. 2005. *Practical Counselling and Helping Skills*. London: Sage Publications Ltd.
- Robiatul Munajah dkk. 2021. *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar*. Jurnal Basicedu. Vol. 5. No. 3.
- Rose, R. dan Howley, M. (2007). *The Practical Guide to Special Education Needs Inclusive Primary Classrooms*. London: Paul Chapman Publishing.
- Santrock, J.W. 2004. *Education Psychology*. New York: McGraw-Hill Company, Inc
- Sehelayati. 2021. *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Jurnal Kebijakan Pendidikan. Vol. 30. No. 3.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media. Hal. 10
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, 2009. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Bandung: Universitas Pendidikan

Indonesia.

Suryadi, Ace & Tilar, HAR. *Analisis Kebijakan: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Walentiningsih, Idayu. 2011. *Pakem Sekolah Inklusif*. Malang :Bayu Media Publishing.

Widoyoko, Eko Putro. 2011. *Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta

Wiyani, Novan Ardy. 2017. *Perencanaan Strategik Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di TK Islam Al-Irsyad Purwokerto*. Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Anak Vol. 3 No. 2.



Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 Kisi-Kisi Instrumen Skripsi

Lampiran 2 Hasil Observasi dan Dokumentasi

Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

Lampiran Daftar Riwayat Hidup Penulis



Lampiran 1

**Kisi-Kisi Instrumen Penelitian Skripsi
Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan
Pendidikan Inklusif Di MTs Anwaarul Hidayah**

Fokus	Sub Fokus	Indikator	Wawancara 1 (Kepala Madrasah)	Wawancara 2 (Waka Kurikulum)	Wawancara 3 (Guru Reguler)	Observasi	Dokumentasi
Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif di MTs Anwaarul Hidayah	1. Faktor Kekuatan (Strenght) di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif	1. Adanya dukungan dari Kementerian Agama melalui PMA No. 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah.	1. Sejauh mana dampak positif yang dirasakan oleh MTs Anwaarul Hidayah dari adanya PMA No. 90 Tahun 2013?	1. Sejauh mana dampak positif yang dirasakan oleh MTs Anwaarul Hidayah dari adanya PMA No. 90 Tahun 2013?	1. Sejauh mana dampak positif yang dirasakan oleh MTs Anwaarul Hidayah dari adanya PMA No. 90 Tahun 2013?	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	Foto
		2. Berkembangnya	1. “Bagaimana bentuk	1. “Bagaimana bentuk	1. “Bagaimana bentuk	Wawancara dengan	

		mental Siswa ABK menjadi lebih mandiri dalam mengikuti kegiatan belajar bersama siswa reguler.	kemandirian dari siswa ABK dalam mengikuti program pembelajaran?"	kemandirian dari siswa ABK dalam mengikuti program pembelajaran?"	kemandirian dari siswa ABK dalam mengikuti program pembelajaran?"	narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	
		3. Evaluasi dilakukan bersama, namun tetap membedakan antara siswa reguler dan ABK.	1. "Kapan proses evaluasi terhadap siswa ABK dan siswa reguler dilakukan?"	1. "Kapan proses evaluasi terhadap siswa ABK dan siswa reguler dilakukan?"	1. "Kapan proses evaluasi terhadap siswa ABK dan siswa reguler dilakukan?"	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah.	
	2. Faktor Kelemahan (Weakness) Di MTs Anwaarul	1. Media sangat kurang memenuhi syarat untuk ABK.	1. "Apa saja media yang dibutuhkan untuk menunjang	1. "Apa saja media yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar	1. "Apa saja media yang dibutuhkan untuk menunjang proses belajar	Wawancara dengan narasumber dan berkunjung	Foto

	Hidayah Dalam Penerapan Kebijakan Pendidikan Inklusif		proses belajar mengajar terhadap siswa ABK?"	mengajar terhadap siswa ABK?"	mengajar terhadap siswa ABK?"	ke MTs Anwaarul Hidayah.	
		2. Kurikulum yang dipakai belum mempunyai standar untuk ABK.	1. "Bagaimana tindak lanjut pihak sekolah terkait kurikulum yang belum mempunyai standar untuk ABK?"	1. "Bagaimana tindak lanjut pihak sekolah terkait kurikulum yang belum mempunyai standar untuk ABK?"	1. "Bagaimana tindak lanjut pihak sekolah terkait kurikulum yang belum mempunyai standar untuk ABK?"	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	
		3. Sarana dan prasarana yang belum mampu mengakomodasi seluruh ABK.	1. "Bagaimana pihak sekolah menyikapi keadaan sarana dan prasarana	1. "Bagaimana pihak sekolah menyikapi keadaan sarana dan prasarana	1. "Bagaimana pihak sekolah menyikapi keadaan sarana dan prasarana	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung	

			yang belum mampu mengakomodasi seluruh ABK?"	yang belum mampu mengakomodasi seluruh ABK?"	yang belum mampu mengakomodasi seluruh ABK?"	ke MTs Anwaarul Hidayah	
		4. Guru pendamping khusus yang masih merangkap jabatan.	1. "Bagaimana pihak sekolah menindaklanjuti tenaga pendidik yang belum sesuai dengan kompetensi keilmuannya?"	1. "Bagaimana pihak sekolah menindaklanjuti tenaga pendidik yang belum sesuai dengan kompetensi keilmuannya?"	1. "Bagaimana pihak sekolah menindaklanjuti tenaga pendidik yang belum sesuai dengan kompetensi keilmuannya?"	Wawancara dengan narasumber, dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	
	3. Faktor Peluang (Opportunities) Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan	1. Menambah serta memperkuat relasi dan jaringan dalam rangka mengembangkan sekolah inklusi.	1. "Sejauh mana jangkauan relasi dan jaringan yang diperoleh MTs Anwaarul Hidayah?"	1. "Sejauh mana jangkauan relasi dan jaringan yang diperoleh MTs Anwaarul Hidayah?"	1. "Sejauh mana jangkauan relasi dan jaringan yang diperoleh MTs Anwaarul Hidayah?"	Wawancara dengan narasumber dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	Foto

	Kebijakan Pendidikan Inklusif						
		2. Memberi contoh kepada sekolah lain untuk ikut serta menerapkan sekolah berbasis inklusif.	1. “Bagaimana tanggapan sekolah lain terkait implementasi pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?”	1. “Bagaimana tanggapan sekolah lain terkait implementasi pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?”	1. “Bagaimana tanggapan sekolah lain terkait implementasi pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?”	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	
	4. Faktor Tantangan (Threat) Di MTs Anwaarul Hidayah Dalam Penerapan	1. Proses adaptasi terhadap lingkungan yang terbilang cukup lama.	1. “Bagaimana respon dari lingkungan tentang penerapan sekolah inklusif di MTs	1. “Bagaimana respon dari lingkungan tentang penerapan sekolah inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?”	1. “Bagaimana respon dari lingkungan tentang penerapan sekolah inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?”	Wawancara dengan narasumber , dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	Foto

	Kebijakan Pendidikan Inklusif		Anwaarul Hidayah?"				
		2. Proses sosialisasi terhadap lingkungan tentang sekolah inklusif yang memerlukan kecakapan ekstra.	1. "Apa saja kecakapan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam mensosialisasikan program pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?"	1. "Apa saja kecakapan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam mensosialisasikan program pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?"	1. "Apa saja kecakapan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah dalam mensosialisasikan program pendidikan inklusif di MTs Anwaarul Hidayah?"	Wawancara dengan narasumber, dan berkunjung ke MTs Anwaarul Hidayah	
		3. Penguatan komunikasi antara pihak sekolah dan pihak wali siswa ABK agar tidak terjadi	1. "Bagaimana pihak sekolah membangun komunikasi dengan wali siswa ABK agar	1. "Bagaimana pihak sekolah membangun komunikasi dengan wali siswa ABK agar	1. "Bagaimana pihak sekolah membangun komunikasi dengan wali siswa ABK agar	Wawancara dengan narasumber, dan berkunjung ke MTs	

		kesalahpahaman persepsi.	tidak terjadi kesalahpahaman persepsi?"	tidak terjadi kesalahpahaman persepsi?"	tidak terjadi kesalahpahaman persepsi?"	Anwaarul Hidayah	
--	--	-----------------------------	---	---	---	---------------------	--



Lampiran 2



Halaman MTs Anwaarul Hidayah



Ruang Kelas MTs Anwaarul Hidayah



Gedung Ponpes Anwaarul Hidayah



Bakal Bangunan Masjid Ponpes dan MTs Anwaarul Hidayah



Bakal Perpustakaan MTs Anwaarul Hidayah



Teras MTs Anwaarul Hidayah



Bagan Struktur Organisasi MTs Anwaarul Hidayah



Papan Visi & Misi MTs Anwaarul Hidayah



Dokumentasi Pasca Wawancara Dengan Waka Kurikulum (Bapak Miftahul Ikhsan, S.Pd) dan Salah Satu Dewan Guru Pengampu ABK (Ibu Rohmah Purwanti, S. E.)



Wawancara Dengan Kepala MTs Anwaarul Hidayah (Ibu Azka Silma Awawina, S. Sos.)



Wawancara Dengan Waka Kurikulum MTs Anwaarul Hidayah (Bapak Miftahul Ikhsan, S. Pd.)



**Tugas Pokok Dan Fungsi Pengelola
Madrasah Tsanawiyah Anwaarul Hidayah
Karangnangka-Kedungbanteng-Banyumas**

A. Tugas Pokok Dan Fungsi Kepala Madrasah

Kepala Madrasah memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Pemimpin, Inovator, dan Motivator.

a. Kepala Madrasah selaku Edukator

Kepala Madrasah selaku Edukator bertugas melaksanakan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien (*lihat tugas guru*).

b. Kepala Madrasah selaku Manajer mempunyai tugas, antara lain:

1. Menyusun perencanaan;
2. Mengorganisasikan kegiatan;
3. Mengarahkan kegiatan;
4. Mengkoordinasikan kegiatan;
5. Melaksanakan pengawasan;
6. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan;
7. Menentukan kebijakan;
8. Mengatur jadwal rapat;
9. Mengambil keputusan;
10. Mengatur proses belajar mengajar;
11. Mengatur administrasi ketatausahaan, siswa, kondusifitas lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta keuangan/RAPBS;
12. Mengatur Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM); dan
13. Mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait.

c. Kepala Madrasah selaku Administrator

Bertugas menyelenggarakan Administrasi: Perencanaan, Pengorganisasian, Pengarahan, Pengkoordinasian, Pengawasan, Kurikulum, Kesiswaan, Ketatausahaan, Ketenagaan, Kantor, Keuangan, Kepustakaan, Laboratorium, Ruang Kesenian dan Keterampilan, Bimbingan Konseling, UKS, OSIM, Serbaguna, Media, Gudang, 10 K.

d. Kepala Madrasah selaku Supervisor

Bertugas menyelenggarakan supervisi mengenai:

5. Proses belajar mengajar;
6. Kegiatan bimbingan dan konseling;
7. Kegiatan ekstrakurikuler;
8. Kegiatan ketatausahaan;
9. Kegiatan kerja sama dengan masyarakat dan instansi terkait;
10. Sarana dan prasarana;
11. Kegiatan OSIM; dan
12. Kegiatan 7K.

e. Kepala Madrasah sebagai Pemimpin

1. Dapat dipercaya, jujur, dan bertanggungjawab;
2. Memahami kondisi guru, karyawan, dan siswa;
3. Memiliki visi dan memahami misi madrasah;
4. Mengambil keputusan internal dan eksternal madrasah; dan
5. Membuat, mencari, dan memilih gagasan baru.

f. Kepala Madrasah sebagai Inovator

4. Melakukan pembaharuan di bidang KBM, BK, Ekstrakurikuler, dan Pengadaan Sarana Prasarana;
5. Melaksanakan pembinaan terhadap guru dan karyawan; serta
6. Melakukan pembaharuan dalam menggali sumber daya di Komite Madrasah dan masyarakat.

g. Kepala Madrasah sebagai Motivator

1. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk bekerja;
2. Mengatur ruang kantor yang kondusif untuk KBM dan BK;
3. Mengatur ruang laboratorium yang kondusif untuk praktikum;
4. Mengatur ruang perpustakaan yang kondusif untuk belajar;
5. Mengatur halaman/lingkungan Madrasah yang sejuk dan teratur;
6. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar sesama guru dan karyawan;

7. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar Madrasah dan lingkungan; dan

8. Menerapkan prinsip penghargaan dan hukuman.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya, Kepala Madrasah dapat mendelegasikan Wakil Kepala Madrasah.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Kepala Bidang Kurikulum

Wakil Kepala Kurikulum memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan;
2. Menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pelajaran;
3. Mengatur penyusunan program pembelajaran (program-program satuan pembelajaran, persiapan mengajar, serta penjabaran dan penyesuaian kurikulum);
4. Mengatur pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler;
5. Mengatur pelaksanaan program penilaian, kriteria kenaikan kelas, kriteria kelulusan dan laporan kemajuan belajar siswa, serta pembagian rapor dan ijasah siswa;
6. Mengatur pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan;
7. Mengatur pemanfaatan lingkungan sebagai sumber belajar;
8. Mengatur pengembangan MGMP dan Koordinator Mata Pelajaran;
9. Melakukan supervisi administrasi dan akademis;
10. Menyusun laporan; dan
11. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Kepala Bidang Kesiswaan

Wakil Kepala Kesiswaan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengkoordinasikan pelaksanaan 7K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, Kesehatan, dan Kerindangan);
2. Mengatur dan membina program kegiatan OSIM meliputi Kepramukaan, Palang Merah Remaja (PMR), Kelompok Ilmiah

- Remaja (KIR), Usaha Kesehatan Madrasah (UKM), Patroli Keamanan Madrasah (PKM), dan lain-lain;
3. Membina pengurus OSIM dalam berorganisasi;
 4. Mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili madrasah pada kegiatan di luar madrasah;
 5. Mengatur mutasi siswa;
 6. Mengatur program pengembangan diri siswa;
 7. Mengatur program Pesantren Kilat/Kegiatan Ramadhan;
 8. Mengatur *class meeting* siswa;
 9. Mengatur kegiatan siswa pada saat libur madrasah, PHBI, PHBN, dan lain sebagainya;
 10. Menyusun dan mengatur pelaksanaan pemilihan siswa berprestasi;
 11. Mengarsip dan menyusun data siswa yang berprestasi dari berbagai tingkatan;
 12. Menyeleksi calon siswa untuk diusulkan menjadi penerima beasiswa;
 13. Mengidentifikasi dan mendata siswa lulusan yang melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas, baik melalui program Bidik Misi, atau program lainnya;
 14. Menyusun dan membuat kepanitiaan, antara lain:
 - c. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
 - d. Pelaksanaan Matsama (Masa Ta'aruf Siswa Madrasah).
 - e. *Class Meeting*.
 - f. Safari Ramadhan.
 - g. Pagelaran Lomba Kelas: Menunjuk Koordinator lomba pada *Haflah Akhirussanah*, dan kepanitiaan pada kegiatan siswa lainnya;
 15. Memastikan penyampaian informasi kepada guru, siswa, dan orang tua siswa dengan cara berkoordinasi dengan wali kelas;
 16. Membuat laporan kegiatan kesiswaan secara berkala; serta
 17. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Kepala Bidang Sarana & Prasarana

Wakil Kepala Sarana & Prasarana mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana untuk menunjang proses belajar mengajar termasuk di kelas, ruang guru, dan ruang kantor;
2. Memfasilitasi kebutuhan sarana dan prasarana sekolah, guru, karyawan, dan siswa;
3. Merencanakan program pengadaannya;
4. Mengatur pemanfaatan sarana dan prasarana;
5. Mengelola perawatan, perbaikan, dan pengisian;
6. Mengatur pembukuannya;
7. Menyusun laporan; serta
8. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

E. Tugas Pokok dan Fungsi Wakil Kepala Bidang Hubungan Masyarakat

Wakil Kepala Hubungan Masyarakat memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengembangkan hubungan dengan komite madrasah dan peran komite madrasah;
2. Membina hubungan antara madrasah dengan orang tua siswa;
3. Menjalin hubungan dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka pengembangan madrasah;
4. Menjalin hubungan baik dengan koordinator pondok pesantren;
5. Bertanggungjawab atas selesainya/lunasnya keuangan siswa (infaq, semester, UAS, dan keuangan lainnya) melalui koordinasi dengan koordinator pondok pesantren;
6. Koordinasi dengan semua staf untuk kelancaran kegiatan madrasah;
7. Menyelenggarakan bakti sosial, karya wisata, studi *tour* madrasah, studi banding dalam rangka mengembangkan profesionalitas guru, karyawan, dan siswa;

8. Menyelenggarakan pameran hasil pendidikan di madrasah (gebyar pendidikan);
9. Mewakili Kepala Madrasah apabila berhalangan untuk menghadiri rapat masalah yang bersifat umum;
10. Membuat laporan kegiatan secara berkala; serta
11. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

F. Tugas Pokok dan Fungsi Bendahara Madrasah

Secara umum, Bendahara Madrasah bertugas membantu Kepala Madrasah dalam hal sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan keuangan madrasah baik bulanan/tahunan bersama Kepala Madrasah;
2. Berkoordinasi dengan Bendahara Yayasan Anwaarul Hidayah dalam hal keuangan;
3. Menerima segala bentuk dan jenis pembayaran keuangan dari siswa seperti MOSBA, infaq *haflah*, semester, UAS, UN, Wisuda, dan keuangan-keuangan lainnya;
4. Menerima pembayaran gaji guru dan pegawai dari Yayasan Anwaarul Hidayah;
5. Mengatur keluar dan masuknya uang operasional madrasah;
6. Membuat laporan keuangan kepada Kepala Madrasah dan Bendahara Yayasan; serta
7. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

G. Tugas Pokok dan Fungsi Wali Kelas

Tugas pokok dan tanggung jawab Wali Kelas adalah membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Mengelola kelas;
2. Mengatur pelaksanaan pemilihan pengurus kelas;
3. Menyelenggarakan administrasi kelas yang meliputi: denah tempat duduk siswa, jadwal pelajaran, daftar piket kelas, jurnal kelas, dan tata tertib kelas;
4. Mengetahui identitas dan kepribadian siswa;

5. Mengetahui tingkat kemampuan, status sosial/ekonomi siswa;
6. Merekapitulasi kehadiran siswa;
7. Pengisian daftar kumpulan nilai siswa sesuai format leger madrasah;
8. Pembuatan catatan khusus tentang siswa;
9. Melaksanakan kegiatan kelas seperti kajian mingguan dan bulanan;
10. Bekerjasama dengan Wakil Kepala Kesiswaan dalam melakukan pemeriksaan, pembimbingan, pemanggilan siswa dan orang tua siswa apabila telah menyalahi aturan madrasah;
11. Pencatatan mutasi siswa;
12. Pengisian buku laporan hasil belajar siswa;
13. Pembagian buku laporan hasil belajar siswa;
14. Menyimpan buku laporan hasil belajar siswa sesuai dengan tempat yang telah ditentukan oleh madrasah; serta
15. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah

H. Tugas Pokok dan Fungsi Koordinator BK

Peran Guru Pembimbing menurut PP No. 74 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Guru Pembimbing dan Konseling/Konselor memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas Guru Pembimbing dan Konseling/Konselor terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah/madrasah. Tugas Guru Pembimbing dan Konseling/Konselor yaitu membantu peserta didik dalam:

1. Pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai bakat dan minat;
2. Pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat;

3. Pengembangan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah/madrasah secara mandiri;
4. Pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir; serta
5. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

I. Tugas Pokok dan Fungsi Guru

Guru bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pembelajaran secara efektif dan efisien. Tugas dan tanggung jawab seorang guru meliputi:

1. Membuat perangkat pembelajaran, meliputi Silabus, Program Tahunan dan Program Semester, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan LKS;
2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran;
3. Melaksanakan kegiatan penilaian proses belajar; ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan semester, ulangan kenaikan kelas, dan ujian akhir madrasah;
4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian;
5. Menyusun dan melaksanakan program perbaikan atau remedi serta pengayaan;
6. Mengisi daftar nilai siswa (UH, UTS, UAS) serta memberikan kepada wali kelas sesuai format yang telah ditentukan oleh madrasah;
7. Melaksanakan kegiatan membimbing (pengimbasan pengetahuan) kepada guru lain dalam proses kegiatan belajar mengajar;
8. Membuat alat peraga atau media pembelajaran;
9. Menumbuhkembangkan sikap menghargai karya seni;
10. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum;
11. Melaksanakan tugas tertentu di madrasah;
12. Mengadakan pengembangan program pembelajaran yang menjadi tanggung jawabnya;
13. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar siswa;

14. Mengisi dan meneliti daftar hadir siswa sebelum memulai pembelajaran;
15. Mengatur kebersihan ruang kelas dan ruang praktikum;
16. Mengumpulkan dan menghitung angka kredit untuk kenaikan pangkatnya;
17. Menghitung dan melaporkan tingkat kehadiran atau absensi siswa kepada wali kelas untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; serta
18. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

J. Tugas Pokok dan Fungsi Tata Usaha dan Bagiannya

a. Kepala Tata Usaha (TU)

Koordinator Tata Usaha Madrasah mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan madrasah, serta membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan program kerja Tata Usaha Madrasah;
2. Pengelolaan keuangan madrasah bersama Bendahara Madrasah;
3. Pengurusan administrasi ketenagaan dan siswa;
4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Tata Usaha Madrasah;
5. Penyusunan administrasi perlengkapan madrasah;
6. Penyusunan dan penyajian data statistik madrasah;
7. Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7K;
8. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengurusan ketatausahaan;
9. Melayani pengambilan ijasah, dibuktikan dengan buku tanda bukti pengambilan ijasah yang berisi catatan keuangan siswa (yang telah menjadi kewajiban siswa) serta tanda tangan siswa;
10. Melaksanakan penyimpanan ijasah dengan benar dan aman;
11. Membantu Kepala Madrasah menyusun RABS/RABM bulanan maupun tahunan;
12. Menyiapkan dokumen-dokumen madrasah, tenaga guru, dan siswa;
13. Membuat data siswa dengan detail informasi selengkap-lengkapannya, termasuk memuat nomor telepon siswa dan orang tua siswa;
14. Membuat absensi siswa dan jurnal kelas;

15. Menyiapkan segala bentuk administrasi dalam bentuk soft file di komputer sekolah demi ketertiban dan kenyamanan administrasi madrasah; dan
 16. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.
- b. Bagian-Bagian Tata Usaha (Staf TU)
- TU Bagian kepegawaian:
 1. Menangani setiap mutasi kepegawaian yang menyangkut tentang pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan tingkat, perubahan gaji, pemberhentian, dan mutasi lain baik untuk guru maupun karyawan;
 2. Mengerjakan buku induk pegawai;
 3. Mengurusi presensi guru dan karyawan;
 4. Membuat daftar urutan kepangkatan (DUK)
 5. Mengurusi dan menyusun SK GTY Guru dan Karyawan;
 6. Membuat data-data dinding kantor dalam bentuk:
 - Data personalia guru dan karyawan.
 - Jadwal KBM.
 - Kalender Madrasah.
 - Membuat papan informasi dan papan lainnya yang sejenis.
 7. Menyusun data dan laporan kepegawaian;
 8. Membantu proses penetapan angka kredit;
 9. Melaksanakan kearsipan personal kepegawaian;
 10. Menyusun kearsipan data personal guru, pegawai, dan karyawan sesuai dengan tempatnya; serta
 11. Bertanggungjawab kepada Kepala TU.
 - TU Bagian Inventaris Barang/Logistik
 1. Melaksanakan penerimaan dan penyimpanan serta menginventarisasikan barang-barang milik Madrasah;
 2. Menyiapkan dan mengerjakan buku induk inventaris maupun non-inventaris lengkap dengan nomor dan kode dari masing-masing barang;

3. Menjaga dan memelihara alat dan barang milik madrasah;
4. Mengajukan kebutuhan barang-barang inventaris umum;
5. Membuat laporan mengenai barang-barang inventaris;
6. Mengurus peralatan rumah tangga dan alat-alat gudang;
7. Menerima dan menyimpan barang belanja kantor ke gudang;
8. Membuat laporan barang habis pakai secara berkala;
9. Koordinator bagian kebersihan;
10. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan langsung oleh atasan; dan
11. Bertanggungjawab kepada Kepala TU.

➤ TU Bagian Kesiswaan

1. Mengerjakan buku induk siswa;
2. Menyiapkan dan mengisi buku klaper;
3. Mengerjakan leger nilai setelah menerima nilai (format sesuai leger) dari wali kelas;
4. Membuat data statistik dan rekapitulasi siswa tiap bulan;
5. Mengelola administrasi beasiswa;
6. Menangani pengarsipan dokumen siswa;
7. Menangani segala macam informasi kesiswaan (informasi masuk dan keluar);
8. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan langsung oleh atasan; dan
9. Bertanggungjawab kepada Kepala TU.

➤ TU Bagian Persuratan/Kearsipan

1. Menangani buku agenda rapat dan notulensi rapat;
2. Menangani segala jenis surat menyurat
3. Menangani dan menyimpan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan tempatnya;
4. Menangani pengarsipan surat/dokumen madrasah sesuai dengan kode persuratannya;

5. Mendistribusikan surat undangan, informasi, pemberitahuan, dan surat-surat lainnya, baik kepada guru, karyawan, siswa, dan wali siswa dalam bentuk surat kertas maupun surat elektronik;
6. Menerima dan melayani tamu madrasah;
7. Melayani legalisasi;
8. Pengetikan persuratan dan membantu operator komputer;
9. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan langsung oleh atasan; dan
10. Bertanggungjawab kepada Kepala TU.

K. Tugas Pokok dan Fungsi Laboran

Pengelola laboratorium membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengadaan alat dan bahan laboratorium;
2. Menyusun jadwal penggunaan laboratorium;
3. Membuat tata tertib penggunaan laboratorium;
4. Mengatur penyimpanan dan daftar alat-alat laboratorium;
5. Pemeliharaan dan perbaikan alat-alat laboratorium;
6. Inventarisasi alat-alat laboratorium;
7. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium; dan
8. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.

L. Tugas Pokok dan Fungsi Pustakawan

Pustakawan Madrasah membantu Kepala Madrasah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengadaan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika;
2. Pengurusan pelayanan perpustakaan;
3. Perencanaan pengembangan perpustakaan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan buku-buku/bahan pustaka/media elektronika;
5. Menginventarisasi buku-buku/bahan pustaka/media elektronika;

6. Melakukan pelayanan bagi siswa, guru, dan tenaga kependidikan lainnya;
7. Penyimpanan buku-buku/ bahan pustaka/media elektronika;
8. Menyusun tata tertib perpustakaan;
9. Melaksanakan kegiatan berupa event/acara untuk kemajuan perpustakaan serta meningkatkan minat siswa terhadap perpustakaan;
10. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan perpustakaan secara berkala; dan
11. Bertanggungjawab kepada Kepala Madrasah.



Lampiran 3



**YAYASAN ANWAARUL HIDAYAH KARANGNANGKA
MTs ANWAARUL HIDAYAH KARANGNANGKA**

Jl. Lingkar Utara Desa Karangnangka RT 3 RW 01
Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas (53152)
No. Telp : 081338818809 email : mtsawh1@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

No : 04.030/S.Per/MTs.AH/III/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala MTs Anwaarul Hidayah, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Himmam Akbar Aulady
NIM : 1617401061
Prodi : Manajemen Pendidikan Islam/FTIK
Alamat : Desa Taraban RT 06 RW 07, Paguyangan, Brebes.

Menerangkan bahwa nama tersebut benar-benar telah melakukan observasi penelitian guna melengkapi kebutuhan skripsi dengan judul "**Analisis SWOT Terhadap Kebijakan Penerapan Pendidikan Inklusif di MTs Anwaarul Hidayah**".

Demikian surat pernyataan ini kami keluarkan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kedungbanteng, 20 Maret 2023
Kepala Madrasah

Azka Silma Awawina, S.Sos.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Himmam Akbar Aulady
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 19 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Hobi : Membaca, Traveling
Cita-Cita : Hidup Mulia & Mati *Khusnul Khotimah*
No. Telepon/Whatsapp : 0812 8958 112
Nama Ayah Kandung : Slamet Rianto
Nama Ibu Kandung : Umma Farida
Alamat Lengkap : Dukuh Krajan RT 006 RW 007
Desa Taraban, Paguyangan, Brebes

B. Riwayat Pendidikan

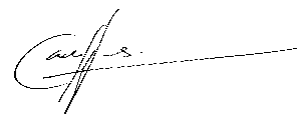
1. TK Handayani 2000-2002
2. SD Negeri 04 Taraban 2002-2008
3. SMP Negeri 01 Paguyangan 2008-2011
4. SMA Negeri 01 Mojo, Kediri 2011-2014
5. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (Dalam Proses)

C. Pengalaman Organisasi

1. Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 01 Mojo Kediri
2. Ketua Umum Komunitas Leadership, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan UIN SAIZU Purwokerto Masa Bakti 2017-2018
3. Koordinator Divisi Advokasi, Komunikasi, dan Informasi Himpunan Mahasiswa Jurusan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah & Ilmu Keguruan UIN SAIZU Purwokerto
4. Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa Obsesi
5. Humas Eksternal Komunitas Fotografi FIXLENS UIN SAIZU Purwokerto Masa Bakti 2017-2018
6. Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Purwokerto Masa Bakti 2019-2020
7. PCNU Lesbumi Kabupaten Brebes Masa Bakti 2020-2022

Purwokerto, 31 Maret 2023

Yang Menyatakan



Himmam Akbar Aulady